



Tahun 2022

PERUBAHAN RENJA



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana pada pasal 360 ayat satu sampai dengan ayat 3, menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan Perubahan bahan Renja perangkat daerah yang dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Bandung, September 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	8
II.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES TAHUN 2020, TAHUN 2021 dan TRIWULAN II TAHUN 2022	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	98
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	133
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	144
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	177
III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	187
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	187
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	190
	3.3 Program dan Kegiatan.....	196
IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	202
V.	PENUTUP	331

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	10
2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	98
2.3	Capaian Indikator Kinerja Prohram/Eselon III Tahun 2020	105
2.4	Capaian Indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020	111
2.5	Capaian Indinaktor SPM Provinsi tahun 2020	118
2.6	Capaian Indikator Program Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	119
2.7	Capaian indikator Program Sumber Daya Kesehatan Tahun 2020	124
2.8	Capaian Indikator Program Manajemen Kesehatan Tahun 2020	128
2.9	Realisasi Anggaran Tahun 2021	129
2.10	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 Triwulan 2	135
2.11	Data Ketercapaian Pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	136
2.12	Capaian Kinerja SPM Provinsi Bidang Kesehatan tahun 2022	138
2.13	Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2021 dan Tahun 2022 s/d Triwulan 2	139
2.14	Review terhadap rancangan RKPD tahun 2022 Provinsi Jawa Barat	145
2.15	Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline	177
2.16	Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline	179
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan	192
4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat	210

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu, dan memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah wajib membuat dokumen rencana kerja, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat, tidak terkecuali Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Provinsi Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Hal ini tentunya masih akan berpengaruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2022. Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana membawa situasi pandemi Covid-19 ini ke dalam situasi yang dapat diperlakukan sebagai situasi endemis. Hal ini akan berdampak terhadap kebijakan di bidang kesehatan dimana persiapan-persiapan untuk menghadapi adaptasi keboasaan baru pasca pandemi harus sudah mulai dilakukan dengan porsi yang mungkin akan lebih besar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang berpedoman kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
2. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2022, adanya perubahan kebijakan baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional, maka Dinas Kesehatan melakukan perubahan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tertuang di dalam dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tidak terlepas dari tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting;
25. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 581);

40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
41. Keputusan Menteri Keuangan No 6/KM 7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 28 Seri E);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Nomor 12 Seri E);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
50. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,

51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
52. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat
54. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
56. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.1751-Dinkes/2014 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi pada Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi.
57. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
58. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
59. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13912/KS.01/PP tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai acuan/pedoman bagi :

1. Bidang/Seksi dan UPTD/Rumah Sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022.

2. Bidang/Seksi dan UPTD/Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020, 2021 DAN TRIWULAN 2 TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2020. Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melihat: (1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 triwulan II.

2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT				100%	11,408,150,000			979,780,750	965,088,750	98.50 %
	Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi mengenai informasi teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kab/Kota) 2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota)	100%	11,408,150,000	70 %	56,0 %	14,745,000	12,378,395	96.0 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab; 4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab; 5) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P3 Kab. Sumedang; 6) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lap) 7) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Bimbingan Teknis Klinis K2; (1 Kab) 8) Jumlah Dokumen MoU Rujukan kab Ciamis; 9) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Maklumat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan di PKM dan RS di kab ciamis; 10) Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop pengenalan dan implementasi Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab. Ciamis; (30 Org) 11) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian Maternal Dan Perinatal kab ciamis; 12) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilittaif kab ciamis; 13) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab. Pengembangan (kab ciamis); 14) Jumlah Dokumen Laporan hasil Kesepakatan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi dan Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir di Kab Ciamis; 15) Jumlah Laporan hasil Assesment di Fasyankes Kab. Ciamis; 16) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes Kab. ciamis;							
	Peningkatan Gizi Masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95%	1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat Koordinasi teknis program gizi; 2) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD ibu hamil; 3) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD rematri;	100%	8,451,497,700	70 %	59,0 %	241,941,350	236,649,900	97,81 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi Penilaian Pertumbuhan; 5) Jumlah Laporan dan RTL Rapat koordinasi teknis Program Gizi; 6) Dokumen hasil dan RTL Pekan ASI Sedunia; 7) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska pelatihan/ Orientasi PAG di Puskesmas; 8) Jumlah Laporan dan RTL Pendampingan cakupan indikator; 9) Jumlah Laporan dan RTL Bintek Peningkatan Gizi Masyarakat;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10) Jumlah Laporan dan RTLmanajment program gizi; 11) Laporan Hasil konsultasi pusat; 12) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan penyusunan hasil BPB; 13) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi kegiatan program gizi; 14) Jumlah Laporan dan RTL pemenuhan undangan dalam provinsi							
	Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Minum yang Berkualitas	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan terpadu Kesling dan STBM;	100%	3,648,220,000	80 %	80,29 %	140,333,500	137,519,500	97,99 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Workshop Kab/Kota Sehat; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas STBM; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Kesling Terpadu							
	Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama Haji Tahun 2019	Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil kesepakatan pertemuan Koord Kesling RS; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil s pemicuan STBM di DAS Citarum, 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laboratorium Kesehatan;	95%	2,239,050,000	80 %	82,49 %	24,021,000	23,192,000	96,55 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatann Rakor DAS Citarum; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev TTU/TPM/RS; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pengawasan HS Embarkasi; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas HS TPM Transit Jemaah Haji dan; 8) Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian asrama haji.							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	1) Jumlah Dokumen hasil Kesepakatan Pembentukan	75 %	770,851,000	60 %	79,91 %	5,470,000	5,470,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SK Tim GP2SP Puskesmas di 20 Kab/Kota; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Upaya Kesehatan Kerja sektor informal dlm mendukung capaian kinerja Kesehatan kerja Puskesmas di 20 Kab/Kota; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Puskesmas di 20 Kab/Kota							
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan PHBS Rumah Tangga; 2) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Model PHBS	85,2 %	10,324,713,126	4	4	366,315,800	365,742,400	99,84 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tempat Kerja/Sekolah/ Tempat Umum; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Promotif Preventif bersama Mitra Kesehatan (Toma/ Komunitas/ Ormas/ DU); 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Monev PKRS; 5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM Kesehatan di berbagai media dan event; 6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL Distribusi Media Cetak;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; 8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Hasil Workshop/Kursus/Seminar.							
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Aktif; 2) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan Advokasi kepada tokoh masyarakat, komunitas kesehatan, ormas dan dunia usaha; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif;	4	6,521,774,907	4	4	53,405,000	51,594,000	96,61 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas di Kab Subang; 5) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SBH. 6) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembentukan Poskestren Model; 7) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Review Pengembangan UKBM							
	Peningkatan Program Kesehatan Keluarga	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas	1) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi		14,251,300,000	70 %	56,0 %	133,549,100	132,542,100	99,25 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Kesehatan minimal 88%	Kegiatan Upaya Kesehatan Keluarga; 2) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Implementasi Tata Klinis Kesehatan Keluarga; 3) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Sekolah Sehat; 4) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Pemberdayaan Lansia; 5) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi; 6) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi; 7) Laporan hasil dan RTL Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal; 8) Laporan hasil dan RTL Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin; 9) Laporan hasil Dukungan Manajemen Program Kesehatan Keluarga; 10) Laporan hasil dan RTL Pembinaan dan Pemenuhan Undangang Kegiatan Dalam Provinsi; 11) Laporan hasil dan RTL Konsultasi dan Pemenuhan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Undangan Kegiatan Luar Provinsi							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olah Raga	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1) Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji di 27 Kab Kota 2) Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah di 15 Kab Kota	75 %	387,320,000	60 %	0	10,585,000	0	0
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	1). Jumlah Dokumen Laporan hasil Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB yang diobati 90 % 2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab /Kota	91 %	6,416,524,680	89 %	73,16 %	201,643,400	192,390,677	95,41 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			berbasis online dengan aplikasi SITT 3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan Peningkatan Pencegahan dan pengendalian TB pada Anak 4) Jumlah dokumen Laporan Logistik Program P2TB 5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis sesuai permenkes nomor 67 tahun 2016 6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>dapat didiskusikan dengan Kab/Kota</p> <p>7) Jumlah dokumen Laporan Laporan kegiatan Refreshing money laboratorium untuk LRI di 27 kab/Kota</p> <p>8) Jumlah dokumen kontrak tenaga pendamping Tuberkulosis terpenuhi</p> <p>9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM ditingkat provinsi</p> <p>10) Jumlah dokumen pengembangan Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota</p> <p>11) Jumlah Dokumen 16 RS yang tercantum di KMK 350 tahun 2017 melaksanakan</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			layanan TB RO017 melaksanakan layanan TB RO							
	Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS	Persentase Pasien HIV Yang Diobati	<p>1. Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV</p> <p>2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 HIV dapat Terpenuhi</p> <p>3. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota)</p> <p>4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan,</p>	50 %	6,089,837,250	45 %	42 %	165,509,555	160,509,555	97,21 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia</p> <p>5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS</p> <p>6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 k/k</p> <p>7. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV</p> <p>8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Manjemen Program sesuai pedoman</p> <p>9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik,</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Pendamping							
	Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mencapai UCI >90%	1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar; 3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS tingkat Provinsi; 4) Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai	92 %	3,574,140,000	90,5 %	44,8 %	107,067,200	106,447,200	99,42 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			target cakupan IDL dalam rangka pencapaian UCI; 5) Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program yang diberikan honor dari APBD Provinsi selama 1 tahun; 7) Jumlah Dokumen Honor diberikan kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI; 8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2020 dan tersosialisasi up date Program 2021; 11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 12) Jumlah Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi							
	Pengendalian penyakit menular ISPA	Persentase Kab/Kota 50% Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat 2. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran dalam penguatan jejaring kerjasama profesi (lintas sektor) 3. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing-masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA 4.	65 %	1,282,840,000	60,0 %	44,44 %	29,183,789	27,089,500	92,82 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP 5. Diperolehnya dokumen pemantauan Sentinel ILI							
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	1) Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP 2) Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus 3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B 4) Jumlah Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Subdit HPISP	100 %	1,739,953,500	80 %	96 %	73,782,206	72,646,200	98,46 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5) Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis di 13 kab/kota							
	Pencegahan dan pengendalian DBD	Persentase Kab/Kota yang Mencapai IR DBD <49/100.000 Penduduk	<p>1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat</p> <p>2. Jumlah Dokumen SK Tim Pokjanal DBD masing-masing sektor</p> <p>3. Jumlah Draft Surat Edaran Gubernur dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD</p> <p>4. Jumlah Dokumen Pedoman SOP tatalaksana kasus di setiap Faskes</p>	96 %	1,944,081,183	90 %	55,55 %	19,196,179	18,874,300	98,32 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>5. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>6. Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pembentukan SK Satu Rumah Satu Jumantik di Kab/Kota</p>							
	Pengendalian penyakit malaria	Persentase Kab/Kota Sudah Eliminasi Malaria	<p>1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria</p> <p>3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap</p>	100 %	1,348,868,328	93 %	93 %	58,357,874	57,002,500	97,68 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus 4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus 5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu							
	Pengendalian penyakit kusta	Proporsi Cacat Kusta Tingkat II	1) Jumlah Dokumen Kesepakatan Dokter Spesialis Kusta dalam Penanganan dan Pengobatan Kusta; 2) Jumlah Kab/Kota didapatkan data yang Valid dan Akurat;	9 %	4,575,000,000	< 10 %	6 %	111,972,920	109,301,500	97,61 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Jumlah Dokumen Arahan dan Rekomendasi tentang Pengendalian Penyakit Kusta; 4) Jumlah Kab/Kota mendapatkan Sosialisasi Kusta untuk Perguruan tinggi di Jawa Barat							
	Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	'1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis dan Reduksi Cacingan 2) Jumlah dokumen pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur 3) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian	73 %	2,052,964,000	45 %	27,27 %	74,949,841	74,176,200	98,97 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota</p> <p>4) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian cacangan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting</p> <p>5) Jumlah Tenaga pendamping Filariasis dan cacangan dapat terpenuhi sebanyak 2 orang</p> <p>6) Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Cacangan dapat terupdate segera</p>							
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Rabies	1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar	100 %	2,530,408,242	88 %	88 %	40,387,923	36,710,750	90,90 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di Indonesia dan di Jawa Barat</p> <p>3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zoonosis di Daerah Perbatasan Provinsi</p> <p>4. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Daerah Perbatasan</p> <p>5. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi P2 Zoonosis</p>							
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan SI P2PTM Bagi	70 %	12,350,664,000	55 %	51,69 %	124,220,400	122,734,400	98,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program P2PTM; 4) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Kanker dan Gangguan Darah Bagi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 5) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Sektor dan Petugas Kesehatan Puskemas; 6) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Diabetes Melitus Sedunia; 7) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Thalassemia Sedunia; 8) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Sedunia;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM; 10) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PJPD; 11) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PKKD; 12) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Program P2DMGM; 13) Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2PTM; 14) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PTM;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>15) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Program GIF;</p> <p>16) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;</p> <p>17) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Puskesmas;</p> <p>18) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Tingkat Provinsi Jawa Barat;</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			19) Jumlah Laporan Peringatan Hari Disabilitas Internasional; 20) Jumlah Laporan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia; 21) Jumlah Pendamping Teknis GIF; 22) Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Program GIF; 23) Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Program GIF							
	Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa	Persentasi penduduk mengalami gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza Bagi			100 %	74 %	69,961,200	61,870,654	88,44 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Keswa; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota; 4) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia; 5) Tenaga Teknis Pendamping Program Kesehatan Jiwa;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6) Dokumen Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pasung Pada Gangguan Jiwa; 7) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program IPWL di Kab/Kota; 8) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PTRM; 9) Dokumen Laporan Konsultasi Teknis Program Kesehatan Jiwa; 10) Dokumen Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa; 11) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Upaya Deteksi Dini							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Jiwa Anak Sekolah bagi Guru di 27 Kab/Kota; 12) Dokumen Laporan Kegiatan Implementasi Skrining Kesehatan Jiwa Pada Anak Sekolah dengan Kuisisioner SDQ di 14 Kab/Kota							
PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA & KESEHATAN AKIBAT KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI										
	Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra	Persentase kegiatan Rapid Health Assesment	1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran penyakit	100 %	5,008,527,100	100 %	100 %	137,098,020	128,681,200	93,86 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>dan permasalahan kesehatan matra di Provinsi Jawa Barat;</p> <p>4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di Jawa Barat;</p> <p>5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji;</p> <p>6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan kegiatan program bencana bidang kesehatan;</p> <p>7) Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji;</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8) Jumlah tenaga teknis program yang honorariumnya terbayar							
	Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB	Persentase masyarakat yg dilayani di lokasi bencana	1) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans dan SKD KLB; 2) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Difteri dan KLB lainnya; 3) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa; 4) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans Difteri; 5) Jumlah Petugas Surveilans Kab/Kota mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/	100 %	4,948,100,000	100 %	100 %	287,751,200	269,527,200	93,67 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat;</p> <p>6) Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes;</p> <p>7) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kasus AFP/Campak dan Rubela;</p> <p>8) Petugas Surveilans Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun;</p> <p>9) Jumlah petugas Kesehatan Kab kota dan Rumah Sakit mengikuti pertemuan peningkatan sistem pelaporan surveilans puskesmas dan rumah sakit;</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>10) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota mengikuti pertemuan riview penanggulangan KLB tingkat provinsi;</p> <p>11) Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium;</p> <p>12) Petugas Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert</p>							
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								13,452,628,600	10,623,522,041	78,97 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	1) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat melaksanakan evaluasi akreditasi FKTP dan	100 %	6,148,538,240	100 %	94,92 %	144,510,100	136,831,100	94,69 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>mempersiapkan re-akreditasi puskesmas;</p> <p>2) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi Klinik Pratama kab/ kota dan provinsi mendapatkan informasi standar akreditasi Klinik Pratama;</p> <p>3) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP;</p> <p>4) Jumlah Petugas Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota dan LP/ LS provinsi mendapat sosialisasi tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi;</p> <p>5) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang keselamatan pasien;</p> <p>6) Jumlah Peserta Kab/ Kota yang membawahi akreditasi, Mengikuti Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS provinsi dan mendapat sosialisasi tata kelola rekam medis di FKTP;</p> <p>7) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	<p>1) Jumlah Pengelola Lab Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang revisi Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan;</p> <p>2) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS;</p> <p>3) Jumlah Pengelola Laboratorium Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang program K3 di Labkes</p>	60 %	2,632,784,760	30 %	85,20 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Kab/Kota Puskesmas sesuai standar	<p>1) Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penilaian FKTP Berprestasi Tk Provinsi Jawa Barat;</p> <p>2) Jumlah Jumlah Pengelola Program yankes primer dari 27 Kab/Kota dan provinsi yang mampu bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan program yankes;</p> <p>3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monev PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Tahun 2020;</p> <p>4) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor LP/LS Program Indonesia Sehat</p>	100 %	19,694,848,080	86 %	82 %	301,780,700	130,880,548	43,37 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>dengan pendekatan keluarga;</p> <p>5) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Penguatan quick wins Pelayanan Darah di Provinsi Tahun 2020;</p> <p>6) Jumlah Dokumen laporan sinergitas program pelayanan kesehatan primer;</p> <p>7) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer;</p> <p>8) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	1) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional; 2) Jumlah Dokumen validasi dan sinkronisasi data program pelayanan kesehatan tradisional; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL; 4) Jumlah dokumen konsolidasi Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional (SP3T)	96 %	3,633,083,170	72 %	75,23 %	213,404,000	62,742,200	29,40 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kesehatan Tradisional							
	Peningkatan Program Layan Rawat Jawa Barat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait layad rawat	1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota	100 %	277,433,500,000	48,15 %	100,0 %	12,186,653,000	9,692,954,099	79,53 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	Persentase RS siap Akreditasi	1) Jumlah Petugas Penanggung Jawab Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan LP/LS Provinsi mendapat informasi tentang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1; 2) Jumlah Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi dan LP/ LS	100 %	2,137,477,000	70,0 %	86,64 %	4,775,000	4,666,000	97,72 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>provinsi mendapat informasi tentang kegiatan dan evaluasi kegiatan mutu pelayanan kesehatan;</p> <p>3) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Rumah Sakit dan koordinasi LP/ LS;</p> <p>4) Jumlah Peserta Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang tata kelola pelayanan penunjang di RS</p>							
	Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	Persentase Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	100 %	638,981,500	100 %	100%	95,049,000	93,634,500	98,51 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan	Persentase Kab/Kota yang mempunyai 80% RS dengan pencapaian SPM	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka peningkatan	78 %	12,356,746,000	33 %	-	506,456,800	501,813,594	99,08 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelayanan kesehatan rujukan;							
	Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional	Persentase RS Regional yang memenuhi standar	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan RTL dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota;	88 %	1,933,836,820	50 %	-			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5) Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional							
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN								56,839,153,785	47,535,904,156	83,63 %
	Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok Provinsi	95 %	4,687,694,772	91 %	91,12 %	387,194,560	369,762,840	95,50 %
	Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan (Persentase dokumen BA Cabang distribusi alkes)	1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 2) Dokumen Berita Acara Serifikat Distribus Cabang Penyalur Alat Kesehatan; 3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi Usaha	100 %	3,553,455,906	90 %	87,52 %	120,443,987	116,591,900	96,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kecil Obat Tradisional (UKOT)							
	Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	1) Penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di kab/kota dan RSUD; 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan data SDM; 3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan difasilitasi; 4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi; 5) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di wahana;	90 %	8,000,000,000	75 %	75 %	49,045,848	32,169,866	65,59 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6) Koordinasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 7) Kab/Kota difasilitasi peningkatan kompetensi tugas belajar; 8) Pengelola tenaga teknis dan tenaga komputer SDM; 9) RSUD yang mengelola Wajib Kerja Dokter Spesialis difasilitasi							
	Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS Jabar;	70 %	312,000,000,000	70 %	70 %	56,260,892,390	46,995,802,550	85,53 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja ; 4) Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti pembekalan program; 6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan di Kab/Kota							
	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	1) Dokumen penyelenggaraan nakes teladan Puskesmas Teladan;	90 %	8,800,000,000	75 %	0 %	1,375,000	1,375,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan; 3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi; 4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat; 5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat penghargaan;							
	Penguatan Jaminan Kesehatan	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat;	95 %	4,073,834,445	90 %	85,51 %	9,967,000	9,967,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;</p> <p>3) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat Koordinasi dan Evlasi JPKMM di 5 UPTD Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC;</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN							
	Penguatan Pembiayaan Kesehatan	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI Ke Kab/Kota	1) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah DOKumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah;	40 %	3,331,779,280	40 %	40 %	10,235,000	10,235,000	100 %
PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN										
	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	1) Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan 2) Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang kesehatan	100	2,747,295,000	100 %	100 %	813,427,550	788,982,000	96,99 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan							
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1). Jumlah Dokumen Laporan dan Kesepakatan 27 Kabupaten/Kota dalam Pembinaan PIS-PK di masing-masing-masing Daerahnya ; 2). Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2021 terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota; 3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Penggunaan Data PISPK dalam intervensi dan perencanaan kegiatan; 4). Jumlah Dokumen Laporan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	27	18,116,250,000	27	27	26.390,775,000	22,077,389,000	83,66 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelaksanaan BOK di 5 Wilayah							
UPTD										
1. LABKES										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN								133,573,953,215	98,259,573,867	73,56 %
	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi	Jumlah Parameter Pemeriksaan Lingkup Baru Akreditasi	76 %	1,903,720,000	70	75	223,960,000	173,517,807	77,48 %
	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)	Persentase Kepuasan Pelanggan	Jumlah Pengadaan Reagen	75	400,000	60	70	8,586,683,241	8,099,458,378	94,33 %
	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	1) Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	247	30,890,000,000	241	241	124,763,309,974	89,986,597,682	72,13 %
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN								249,010,381	124,321,600	49,93 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Pengunjung	1) Terlaksananya penambahan jenis pemeriksaan terhadap masyarakat; 2) Terlaksananya kehadiran jumlah seluruh karyawan/karyawati; 3) Terlaksananya penambahan kepuasan pelanggan; 4) Terlaksananya penambahan jumlah peserta Uji Profisiensi	24000	7,000,000,000			0	0	0
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN LABORATORIUM KESEHATAN										
	Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Laboratorium Kesehatan	Terpenuhi dan terselenggaranya bentuk dan jenis kesejahteraan pegawai/aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan	100 %	2,441,800,000			5,773,309,790	4,506,430,793	78,06 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. UPELKES										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN								752,398,350	350,048,250	78,63%
	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan; Bimtek Laboratorium Lapangan; Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat	16,63	10,054,525,576	1,00 %	0,93 %	573,465,000	182,340,000	31,80 %
	Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan	Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan	Penilaian akreditasi institusi; Persentase pelatihan yang terakreditasi dalam satu tahun; Jumlah Review dan	≥ 3,5	2,732,886,964	≥ 3,5	3,64	178,933,350	167,708,250	93,73%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga Kerja Non PNS							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PELATIHAN KESEHATAN										
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	1) Jasa konsultasi appraisal; 2) Jasa konsultasi perencanaan; 3) Pembelian lahan; 4) Pengadaan tempat tidur	80 %	65,020,414,187	80%	15,000,000	15,176,000	12,950,,000	85,33%
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT PELATIHAN KESEHATAN										
	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Upelkes	1) Peningkatan kesehatan jasmani aparatur (senam); 2) Peningkatan kesehatan rohani aparatur;	100 %	1,358,653,115	80%		173,100,000	136,100,000	78,63 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Capacity Building; 4) Pakaian Batik; 5) Pakaian Olah raga; 6) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; 7) Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; 8) Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; 9) Kursus/pelatihan/ bimtek/sosialisasi							
3. RS AL-IHSAN										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS AL IHSAN	Prosentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan	80,91 %	1,230,309,698,187	62%	80,45 %	341,963,621,724	303,327,838,515	88.70%.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan		operasional pelayanan Kesehatan							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS AL-IHSAN	Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada rawat jalan dan rawat inap	80 %	405,901,746,000	67%	80,29 %	52,654,490,773	30,284,534,400	57.52 %
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Al Ihsan	Prosentasi pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan	100 %	4,673,770,000			214,695,550	105,676,510	49.22 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. RS JIWA										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS JIWA	1).Promosi melalui Road show kab/kota, mobile keliling, pameran Plakat, iklan di media cetak dan elektronik, Banner, Spanduk, Poster/informasi edukasi, Leaflet /Brosur. 2). Makanan dan Minuman Pasien rawat inap, Persentase kebutuhan obat pasien yang terpenuhi 100%, Bahan laboratorium, Jumlah Makanan dan Minuman petugas Piket dan potensi resiko, Terpenuhinya honor SDM BLUD, Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telephone, dan internet	90 %	9,234,921,696	70 %	88,86 %	61,539,650,098	31,730,729,794	51,56 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa Akreditasi RS RS Jiwa Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa		serta kebutuhan rumah tangga, Pakaian Dinas BLUD, Jumlah Pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan 65 %, Jumlah petugas beresiko terpantau kesehatannya melalui MCU 100 Or, Jumlah tenaga BLUD mendapatkan peningkatan Jiwa Korsa, Persediaan bahan Pemeliharaan gedung non gedung , Biaya Operasional Tenaga Blud untuk Jemput, Pemulangan dan pendampingan Pasung 75%. 3) Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi NAPZA, Konser Rehabilitan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4). Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi NAPZA, Konser Rehabilitan</p> <p>5). Outbound Keswara, Pertemuan Evaluasi Pelayanan Medik, Pertemuan Penguatan Program Nasional di RSJ Provinsi Jawa Barat, Workshop Penguatan Jejaring Keswara, Koordinasi internal pelayanan medic</p> <p>6) Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung 1 Tahun.</p> <p>7). Tersedianya bahan terapi fungsi pasien,</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terselanggarakannya Konser Rehabilitan 8). Family gathering, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) 100 Org, Dropping pasien (pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga, Home visit, mobile outreach (penjangkauan kasus darurat) 24 Kasus, FGD/ Focus Group Discussion (advokasi pasien bermasalah), Membangun kemitraan dan koordinasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan stakeholder terkait keswa (TPKJM), Membangun jejaring dukungan sosial dan pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM, LKS, panti , osialisasi , Sosialisasi deteksi dini bagi guru, kesehatan jiwa kepada care giver, Pelatihan/dukungan psikososial bagi ODGJ, Integrasi pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, Sosialisasi Keswa kepada masyarakat/komunitas, Kegiatan memperingati hari kesehatan jiwa, Hari Bipolar, berkolaborasi dengan LSM, Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan perilaku anak dan remaja, Sosialisasi deteksi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dini bagi guru, Sosialisasi keswa lansia ke petugas panti werda, Penanganan pasien pasung							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Penyediaan Saprak Pelayanan Medis RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Saprak Pelayanan Keperawatan RS Jiwa	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS JIWA	Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada rawat jalan dan rawat inap	70 %	7,184,241,476	50 %	47,65 %	5,558,034,584	3,585,446,721	65 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa (DAK Reguler)									
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jiwa	1) Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Medis RS Jiwa 2).Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa 3).Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa 4).Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa	100 %	1,830,160,532	60%	62%	13,696,964,149	10,654,801,517	77,79%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa		5).Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Keperawatan RS Jiwa 6).Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa 8).Pembangunan Tahap I							
5. RS PARU										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Perlengkapan Pasien Penyediaan media informasi RS Paru Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru Akreditasi RS Paru Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS PARU	Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin Tingkat Capaian Akreditasi Rumah Sakit Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR)) Jumlah Kerja Sama (MOU) dengan Institusi Kesehatan dalam Penanganan Penyakit TB Paru Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat (NDR)	61 %	28,809,966,900	70 %	77,09 %	14,792957,090	13,009,610,078	87,94 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru (BLUD)		Prosentase pasien yang putus berobat (DO) Cost Recovery							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PARU										
	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru Pembangunan RS Paru Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru	Jumlah Hari Perawatan di Bagi Tempat Tidur dikali Pasien di Kali 100%	Angka Kesembuhan Pasien Prosentase Pembangunan Gedung dan Bangunan yang terpenuhi sesuai dengan standart RS Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR))	61%	28,809,966,300	50%	55%	13,554,635,450	12,272,912,827	90,54%
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PARU										
	Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Paru	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru	100 %	1,221,020,000	75%	78%	15,564,140,901	12,111,608,895	77.82%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru Pengadaan peralatan kantor RS Paru Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru		Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan RS Paru		Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan RS Paru							
6. RS JAMPANGKULON										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Jampangkulon		77,12 %	237,000,000,000	76,15%	81,04 %	75,509,181,403	71,432,348,661	94.60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Laporan Keuangan/Audit Indevenden RSUD Jampangkulon Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD RSU Jampangkulon									
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pembangunan Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon - Pembuatan DED Gedung Rawat Inap, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU Pembuatan AMDAL - Jasa Konsultan perencana berkala pembangunan gedung rawat jalan	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS JAMPANG	1.Gedung Diagnostic Center 2.Gedung IBS, ICU 3.Gedung Rawat Inap 4.Gedung Instalasi Gizi 5.Gedung IPSRS 6.Gedung Jenazah 7.Penataan lahan/Taman 8.Jasa Konsultan Pengawasan Gedung Diagnostic, IBS, ICU,	75 %	98,004,742,045	58 %	61,52 %	84,655,132,627	65,671,774,964	77,58%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	baru dan gedung diagnostic center RSUD Jampangkulon Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon		Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jampangkulon	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon	100 %	13,950,000,000			17,568,263,592	13,463,861,663	76,64 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Outsourcing Kebersihan dan keamanan RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon		Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Outsourcing Kebersihan RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Outsourcing Keamanan RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon							
7. RS PAMEUNGPEUK										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Pameungpeuk	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk	86.92	600,000,000	81,91%	82,78 %	41,201,635,452	32,967,801,788	80,02%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk		Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS PAMENGPEUK	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan perkantoran	70 %	32,000,000,000	62 %	63,59 %	71,659,559,103	54,084,907,369	75.47 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Masjid di RSUD Pameungpeuk Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Laundry dan Pelayanan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Laundry dan Pelayanan Lainnya Terbangunnya Gedung Poli Ranap Terbangunnya Gedung Laundry Terehabilitasinya IPAL di RSUD Pameungpeuk							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Pameungpeuk	Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek PNS Terbayarnya Gaji Pegawai Medis dan Paramedis, Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas PNS, Terfasilitasinya Pengadaan ATK	100 %	1,163,060,766			13,572,099,021	9,982,263,697	73,55%
8. RS KESEHATAN KERJA										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Peningkatan Pelayanan Prima dan Komprehensif	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Kesehatan Kerja	Jasa Profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Non Kesehatan sebanyak 150 orang, Bench	70 %	131,400,000,000	62 %	81,3 %	3,179,119,894	2,087,778,048	65,67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Pelayanan di RSUD Kesehatan Kerja Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan Penyusunan Dokumen AMDAL, RPL dan RKL Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja		Mark 100 org tenaga RSUD KK ke Rumah Sakit Role Model, 500 Dokumen SOP Obat-obatan, formularium rumah sakit, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai Tenaga Kesehatan yang kompeten 250 orang Makanan Pasien 32.850 porsi							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Penataan RSUD Kesehatan Kerja Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS KESEHATAN KERJA	Dokumen Perencanaan Dokumen, DED, Perijinan IMB Dokumen Lingkungan	80 %	239,000,000,000	67 %	1,91 %	107,840,676,625	106,424,387,383	98,68%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Dokumen Luas Lahan Keseluruhan 8 (delapan) Hektar</p> <p>Penyediaan Air Bersih, Penyaluran Air Hujan, Pengolahan Air Limbah, Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penampungan Sampah Sementara,</p> <p>Penyelenggaraan K3RS, Pengendalian infeksi, Tanggap Darurat</p> <p>Alat Kedokteran 200 jenis, Dokumen Rencana Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Medis</p>							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Barang dan ATK Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Kesehatan Kerja	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah rapat yang dilaksanakan Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan Jumlah penyediaan jasa kantor Jumlah barang dan Laporan pemanfaatan ATK Jumlah aparatur Dokumen Perencanaan Dokumen Pelaporan"	100 %	10,000,000,000	70%	76 %	17,568,263,592	13,463,861,663	76,64%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dokumen Pengelolaan Keuangan Dokumen Pelaporan Keuangan" Jumlah Sistem Informasi Jumlah Kerjasama Jumlah Kegiatan Pemasaran" Pemeliharaan Alat Kesehatan							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama dan pencapaian target indikator kinerja Program. Berikut analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 triwulan 2.

2.2.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022.

2.2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah/ Biro	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Ratio Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	85/100.000 KH	85,77/100.000 KH	99,10 %
2.	Rasio Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	5.0/1000 KH	3,18/1.000 KH	157,23 %
3.	Prevalensi Stunting	Persen	25,2 %	26,21 %	96,15 %
4.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90 %	73,16 %	82,20 %
5.	Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	99,81 %	95,90 %	96,08 %

7.	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	Persen	48,15 %	100 %	207,68 %
8.	Persentase Rumah Sakit Akreditasi	Persen	68,99 %	88,95 %	128,93 %
9.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage	Persen	90 %	84,46 %	128,93 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja pada Dinas Kesehatan :

a) Rasio Kematian Ibu

Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yaitu 85,77 per 100.000 kelahiran hidup di atas target yang ditetapkan sebesar 85 per 100.000 kelahiran hidup hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus kematian ibu di Jawa Barat yaitu dari 684 kasus pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 yaitu 745 kasus.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2020 kematian ibu tahun 2020 sebesar 745 kasus, ada peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 684 kasus, kenaikan sebanyak 61 kasus. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2020 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan dari peningkatan kasus kematian ibu yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, tidak seluruh kabupaten/ kota memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid-19, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal. Penyebab kematian Ibu antara lain pendarahan sebanyak 27,65%, Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 28,72%, gangguan darah sebanyak 9,80%, Gangguan Metabolik sebanyak 3,49% dan 26,58% disebabkan lain-lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator adalah kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi NSPK baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, penyesuaian pelaksanaan program selama pandemi Covid-19, penyusunan pedoman pelayanan Kesehatan keluarga selama

pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

b) Ratio Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, didapat dari jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio kematian bayi tahun 2020 3,18/1000 KH menurun di bandingkan tahun 2019. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian bayi.

Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh 40,04% diakibatkan oleh BBLR, 29,16% disebabkan Asifikasia, 14,91% penyebab lain-lain dan 11,98% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan.

Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 65,11% penyebab lain-lain, 18,91% disebabkan pneumonia, dan 10,53% disebabkan oleh diare. Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2020 jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 2766 bayi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 2861 bayi.

Permasalahan yang dihadapi yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, Pembuatan Pedoman Pelayanan Kesga selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Adapun 10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2020 antara lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bogor.

c) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting yang di Jawa Barat tahun 2020 adalah 26,21% angka tersebut menggunakan baseline studi Status Gizi balita Indonesia tahun 2019. Hasil survei tahun 2020 masih dalam proses pengolahan data sehingga belum ada penetapan prevalensi. Jumlah balita di Jawa Barat adalah 4.308.604 orang. Berdasarkan hasil surveilans gizi tahun 2020 yang diolah dalam elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) balita yang diukur tinggi badan pada bulan agustus adalah 2.897.336 orang dan jumlah balita stunting yang ditemukan sebanyak 277.847 orang (pengunduhan data per 4 Januari 2020).

Permasalahan pertama waktu pelaksanaan survei dilakukan akhir tahun jadi masih membutuhkan waktu pengolahan data, kedua data surveilan gizi belum menggambarkan seluruh balita karena pengukuran belum mencakup seluruh sasaran balita, dan petugas yang mengukur masih ada yang belum terlatih, serta sarana dan prasarana yang digunakan belum seluruhnya menggunakan alat yang standar. Upaya pemenuhan data dengan memperbaiki kualitas data surveilans gizi sehingga diperoleh data valid dari hasil surveilans gizi jadi tidak tergantung dengan data hasil survei. Dan untuk menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat telah dilakukan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah melakukan orientasi tatalaksana gizi buruk utk petugas puskesmas, melakukan diseminasi PMBA utk petugas puskesmas, advokasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, mendorong kabupaten kota untuk optimalisasi pelayanan gizi selama pandemi dengan mengeluarkan protokol pelayanan gizi semasa pandemi, mendorong kabupaten kota untuk melakukan inovasi pelayanan percepatan penurunan stunting, Melakukan penilaian konvergensi stunting di 20 kabupaten kota lokus, Melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, melakukan sosialisasi pelayanan gizi di masa pandemi, menyusun protokol pelayanan gizi selama pandemik, pembuatan SK Tim Percepatan Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan stunting, Pembuatan Draf RAD percepatan penurunan stunting, dan Rapeda Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat.

d) Keberhasilan Program TB

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, capaian tersebut dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19 sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian Sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29 Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasilitas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota

di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

e) Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan.

Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan Obat-obatan dan alat kesehatan), Pada tahun 2020 warga masyarakat yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Jawa Barat sejumlah 548.303 jiwa yang tersebar di 13 Kab/Kota, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kab, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut.

Permasalahan yang dihadapi ialah masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparaturnya terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan database/baseline menyebabkan indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi dan belum semua kabupaten kota melaksanakan pelaporan jika terjadi bencana atau KLB wabah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan KLB Wabah bencana alam bidang Kesehatan, Pemantauan Penyakit dan Masalah Kesehatan Matra.

f. Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase puskesmas yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 95,90 %, dimana jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 1.028 puskesmas. Permasalahan capaian th 2020 belum mencapai target yang ditetapkan (99.81), hal ini dikarenakan awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Upaya yang sudah dilaksanakan dalam upaya menjaga mutu pelayanan antara lain pendampingan akreditasi oleh Tim Pendamping tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun reakreditasi.

Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu, Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop

Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Survei Akreditasi FKTP Jabar, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 .

g) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

Kegiatan Layad Rawat merupakan program inovasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah, program ini bertujuan agar warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat Tahun 2020 Capaian indikator sebesar 100%, dimana guna mendukung program layad rawat, telah di tanda tangani Perjanjian Kerjasama Layad Rawat antara provinsi dengan 27 kab kota, serta telah difasilitasi adanya layanan layad rawat call center Public Service Center (PSC) 119 serta jejaringnya di semua Kabupaten Kota se Jawa Barat. Selain itu juga telah didistribusikan 86 sepeda motor PSC 119 layad rawat ke kab kota pada awal tahun 2020, serta telah diadakan tambahan 20 lagi sepeda motor NMax pada Desember tahun 2020 yang akan segera didistribusikan. Pengadaan kendaraan roda dua untuk mendekatkan akses pelayanan ke daerah yang tidak terjangkau dengan ambulance/kendaraan roda empat.

Permasalahan pelaksanaan layad rawat adalah terkait pandemic covid-19 dimana peran PSC 119 makin diandalkan dalam mendukung system rujukan pasien, pengantaran jenazah, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara belum semua Kab kota memiliki sarana prasarana PSC 119 yang lengkap, SDM pendukung maupun bangunan khusus. Upaya yang sedang dilakukan adalah advokasi kepada kab kota agar ada alokasi dari kab kota untuk kegiatan layad rawat ini baik penambahan sarana prasarana, Gedung maupun SDM

Upaya yang dilakukan ialah Kegiatan Layad Rawat Tahun 2020 melanjutkan kegiatan 2019 yaitu penandatanganan Kerja Sama kegiatan Layad Rawat, pemasangan PSC 119 dan atau jejaringnya yang dilengkapi dengan perangkat lunak PSC dan agent nya di 27 Kabupaten/kota, distribusi kendaraan roda dua Layad Rawat. Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Layad Rawat Terencana dan Layad Rawat Tidak Terencana, merevisi DPA yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Layad Rawat.

h) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 88,95 %, dimana jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 Rumah Sakit. Capaian tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan (68,99%), Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 adalah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Permasalahan untuk mencapai indikator ini ialah Awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Kegiatan pertemuan/ workshop terkait akreditasi upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 Rumah Sakit diefisiensikan.

i) Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)

Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage Tahun 2020 capaian indikator sebesar 85,51 %, dimana jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN adalah sebesar 39.411.879 jiwa (Data 31 Desember 2020) dari total penduduk 46.092.205 jiwa (berdasarkan Dirjen Disdukcapil Kemendagri Semester 1 Tahun 2020).

Permasalahan yang dihadapi ialah kekhawatiran akan turunnya capaian kepesertaan menuju UHC akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu banyaknya pekerja yang di PHK sehingga terputus Jaminan kesehatannya dan adanya penonaktifan data PBI yang tidak sesuai/tidak valid dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dilakukan penyesuaian capaian target kinerja Tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang semula target capaian 90% menjadi 85%, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama, dan Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait Jaminan Kesehatan dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020.

Upaya yang telah dilakukan yaitu masing-masing Kab/Kota melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan segmen PPU yang di PHK yang nantinya akan disesuaikan

dengan sistem penjaminan di daerah masing-masing, ada yang masuk ke segmen PBI-JK, Peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Peserta PBPU mandiri sedangkan upaya dalam hal penonaktifan data PBI yang tidak termasuk ke dalam DTKS yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dalam hal percepatan proses verifikasi dan validasi data oleh masing-masing Dinas Sosial Kab/Kota sehingga data yang sudah valid dapat di entrykan kembali kedalam aplikasi SIX-NG dan bisa mengakomodir masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI-JK.

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) didukung dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana capaian indikator kinerja Program seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2020

A. Program Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
A	Program Kesehatan Masyarakat			
1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	70 %	56,0 %	96.0 %
2	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95%	70 %	59,0 %	97,81 %
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Minum yang Berkualitas	80 %	80,29 %	97,99 %
4	Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat	80 %	82,49 %	96,55 %
5	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	60 %	79,91 %	100 %
6	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	4	4	100 %
7	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 88%	70 %	56,0 %	99,25 %
8	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	60 %	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja outcome untuk setiap program adalah sebagai berikut :

1. Program Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat, dengan indikator outcome :

a) Persentase Kab/Kota dengan cakupan Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 88%.

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan tahun 2020 belum mencapai target yaitu 56% (15 kabkota) dari target 70% (19 kab/kota). Dibandingkan dengan tahun 2019, menurun pencapaian sebesar 89% (24 kab/kota). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama terkait pelayanan ANC tertunda sehingga persalinan di faskes tidak terpantau selama pandemi covid19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah, tidak tersedia seluruh kab/kota memiliki fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid 19, Kualitas layanan antenatal, perbedaan sasaran estimasi dan sasaran riil, Pandemi Covid-19, dan refocusing anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, pembuatan pedoman pelayanan kesga selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, supervisi fasilitatif berjenjang terkait kualitas layanan antenatal, koordinasi dan kolaborasi dengan stake holder terkait

b). Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%.

Capaian Kabupaten/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95% tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan laporan dari kabupaten kota belum lengkap, masih dalam proses pengumpulan dan validasi sampai 31 Januari 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah logistik tablet tambah darah tidak dipenuhi 100%, pelayanan pemberian tablet tambah darah terkendala pandemik covid 19, capaian yang ada baru sebatas distribusi belum ada data konsumsi dan pemantauan minum obat TTD bagi ibu hamil.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pembinaan ke kabupaten kota secara daring dan luring, penyusunan protokol kesehatan pemberian tablet

tambah darah pada ibu hamil semasa pandemi, pertemuan sosialisasi pelayanan gizi semasa pandemik, evaluasi program yang sudah dilakukan.

c). Persentase Penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas

Tahun 2019 realisasi tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2020 dengan target yang sama tahun 2020 (yaitu 80%, disamakan targetnya dengan tahun 2019 mengingat pandemi Covid-19), realisasi tercapai sebesar 80,29%. Hal ini karena petugas Kabupaten/Kota walaupun sedang pandemi Covid-19 tapi tetap melaksanakan pembinaan teknis sampai ke Desa/Kelurahan, disamping pendataan lebih dipertajam lagi. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih kurangnya koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait (dengan anggota Pokja Air Minum dan Sanitasi), terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi melalui virtual meeting dengan Kabupaten/Kota dan lintas sektor (Pokja Air Minum dan Sanitasi), dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

d) Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat

Tahun 2020 target persentase penduduk menggunakan jamban sehat pada masa pandemi Covid-19 dikhawatirkan ada penurunan capaian, ternyata pada tahun 2020 capaian (realisasi) melebihi target, hal ini karena petugas Kab/Kota lebih banyak melakukan pemucuan dan pendataan walaupun dengan kondisi terbatas karena pandemi Covid-19. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah koordinasi dengan lintas sektor yang masih kurang terutama dalam berkolaborasi dan bersinergi terkait lokasi desa sasaran yang penerima bantuan (dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Kab/Kota), Terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

e) Persentase Puskesmas di Kab/Kota menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja pada tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, pencapaian target di tahun 2019 ini merupakan upaya terintegrasi program kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan, dampak positif dalam hal ini adalah kemajuan pesat pelaksanaan kesehatan kerja. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja sebagai needs dari semua aspek pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu puskesmas di Kabupaten/Kota mengharuskan pelayanan kesehatan kerja internal melalui pelaksanaan K3 puskesmas yang tercantum pada penilaian akreditasi puskesmas, yang menjadikan hak asasi dari setiap pekerja, lingkungan, pasien dan masyarakat untuk selamat, sehat, aman dan nyaman ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas. Pelaksanaan kesehatan kerja eksternal melalui upaya penggerakan dan pemberdayaan kesehatan kerja di sektor nonformal, yang menduduki 60% dari seluruh jenis pekerjaan pada penduduk di Jawa Barat. Sehingga komitmen pelaksanaan program kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai produktifitas masyarakat pekerja.

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja didapatkan sebesar 79,91%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab/kota dalam menyelenggarakan kesehatan kerja. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak bulan maret 2020, kegiatan – kegiatan di fokuskan dalam upaya pengendalian pencegahan Covid-19. Sehingga menjadi tantangan dalam pencapaian indikator outcome. Puskesmas kab / kota dalam melaksanakan kegiatan kesehatan kerja yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dari indikator outcome, yang secara sinergisitas di lakukan juga dengan dukungan kab/kota, sehingga kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tingkat puskesmas sesuai dengan pencapaian tujuan indikator outcome.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah terjadinya kondisi pandemic Covid-19, dimana seluruh pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan pada pertengahan bulan maret sampai dengan bulan mei, penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah atau Kab/ Kota yang merupakan menjadi target percepatan pencapaian indikator outcome dari kesehatan kerja sempat stagnan di beberapa bulan, awal penetapan pandemic. Selain itu adalah efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan upaya percepatan di awal tahun 2020, dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas melalui orientasi kesehatan kerja untuk Kepala Seksi yang bertanggung jawab pada program kesehatan kerja dan petugas atau pengelola kesehatan kerja. Hal ini sangat efektif

dalam percepatan capaian indikator outcome kesehatan kerja. Kedua adalah, kondisi pandemik Covid-19 menjadikan concern pada puskesmas maupun fasyankes untuk melaksanakan pelayanan yang safety, dimana peningkatan capaian penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), dan sebagainya, pandemi Covid-19 juga membawa dampak kreatifitas dalam pelaksanaan program program kesehatan kerja, yaitu dimana kegiatan dapat tetap dilaksanakan secara daring, yang dapat diikuti oleh banyak target sasaran pencapaian program kesehatan kerja.

f) Persentase Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya didapatkan sebesar 86%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab / kota dalam pelaksanaan kesehatan olahraga.

Berdasarkan penyebab keberhasilan dari indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya adalah fokus pembuatan perencanaan kegiatan – kegiatan pada tahun 2020 dalam pencapaian target outcome, kegiatan yang langsung pada sasaran capaian yaitu:

1. Seluruh masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas fisik, bergerak dan olahraga sesuai dengan BBTB (Baik, Benar, Terukur, dan Teratur), pembinaan kelpompok – kelompok Olahraga di masyarakat.
2. Pembinaan kebugaran CJH (Calon Jemaah Haji), meskipun pada situasi pandemi Covid-19, Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya untuk tahun 2020, akan tetapi pelaksanaan pengukuran kebugaran CJH diawal tahun tetap dilaksanakan (januari s.d maret 2020), dan pelaksanaan di akhir tahun 2020 pada bulan november s.d desember tetap dilaksanakan, dengan metode pengukuran kebugaran secara mandiri melalui aplikasi SIPGAR
3. Pembinaan kebugaran anak sekolah, dengan melalui daring, pembinaan kepada guru – guru olahraga di beberapa kabupaten kota tetap dilaksanakan, penyampaian informasi dan edukasi kepada orang tua murid, untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan bergerak untuk siswa – siswa meskipun dilaksanakan dirumah masing – masing.
4. Pembinaan kebugaran di OPD, dengan melakukan sosialisasi SIPGAR, sehingga kondisi pandemi Covid-19 tidak menghalangi untuk pengukuran kebugaran.

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 60% didapatkan realisasi

sebesar 86%. Pencapaian realisasi di tahun 2020 yang sangat signifikan, hal ini disebabkan antara lain adalah proses tahapan pelaksanaan kegiatan yang simultan dan berkelanjutan dari tahun 2019, yaitu kegiatan yang spesifik dan measurable dalam pencapaian indikator outcome, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan dukungan dari pusat baik pemberian stimulant kit kebugaran untuk kabupaten/kota, anggaran dana dekonsentrasi, dsbnya.
2. Pelaksanaan kegiatan bertujuan peningkatan skill, kapasitas, pembekalan ataupun orientasi bagi petugas kesehatan olahraga di kabupaten/kota dan puskesmas. Kegiatan orientasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh dinkes provinsi akan tetapi juga oleh BKOM (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat), dan kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran BOK ataupun APBD
3. Pelaksanaan kegiatan dengan pembinaan secara terintegrasi melalui tahap monitoring, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan umpan balik dari setiap selesai kegiatan, tujuannya adalah kabupaten / kota mengetahui dan memahami apa yang menjadi tahapan lanjutan untuk pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan terjadinya kondisi pandemi Covid-19, dimana sama halnya dengan program kesehatan kerja, program kesehatan olahraga terkena dampak dalam proses pencapaian indikator outcome. Pada awal pandemi Covid-19, Masyarakat di Jawa Barat terhenti keseluruhan dalam kegiatan olahraga. Pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang sudah memiliki kebiasaan berolahraga baik olahraga berkelompok maupun individu. Penurunan aktivitas fisik dan berolahraga berdampak pada stagnannya laporan pembinaan kelompok olahraga, yang merupakan subouput dalam pencapaian indikator outcome. Selain itu refocusing anggaran yang hanya terfokus pada pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19. Seluruh petugas di puskesmas dan kabupaten /kota terfokus pada pengendalian Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah kegiatan yang harus terintegrasi dalam rangka pengendalian Covid-19, yaitu bagaimana kesehatan olahraga sangat berperan dalam peningkatan imunitas pada masa pandemi Covid-19. Dengan protokol kesehatan olahraga secara individu dapat dilakukan, kegiatan olahraga di masyarakat dapat dilakukan dan pembinaan – pembinaan kebugaran dapat dilaksanakan. Diawal tahun 2020, petugas kesehatan olahraga kabupaten / kota mendapatkan orientasi pelaporan SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga), hal ini menjadi sangat penting bahwa setiap kegiatan – kegiatan kesehatan olahraga yang kabupaten / kota maupun puskesmas laksanakan bisa dilaporkan. Kegiatan ini signifikan membantu dalam pencapaian indikator outcome.

Pada tahun 2020, dalam upaya pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah dengan melibatkan pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga secara terintegrasi, seperti halnya dalam pelaksanaan orientasi K3 perkantoran, dimasukkan juga perihal pengukuran kebugaran pekerja, yaitu sebagai indikator produktivitas pekerja, asumsinya adalah ketika pekerja itu bugar maka produktivitasnya akan meningkat, Upaya lain yang dilakukan di tahun 2020 dalam rangka pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah pelaksanaan kegiatan – kegiatan daring yang bersifat up to date dengan melakukan survey – survey secara online, sehingga petugas kesehatan olahraga di kabupaten / kota dan puskesmas mengetahui kondisi dan status pelaksanaan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

g) Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan harus dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan dimasa pandemi semua kegiatan dilaksanakan secara online.

Pembinaan melalui tokoh masyarakat yang sudah tergabung dengan Forum Komunikasi (Forkom) Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat. Berkolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait, Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan. Melibatkan dalam kegiatan Bidang Kesehatan melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (GEMA) 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Pakai Sabun).

B. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tabel 2.4

Capaian Indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
B.	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit			96,65 %
1	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	89 %	73,16 %	95,41 %
2	Persentase Pasien HIV Yang Diobati	45 %	42 %	97,21 %.
3	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mencapai UCI >90%	90,5 %	44,8 %	99,42 %
4	Persentase Kab/Kota 50% Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	60,0 %	44,44 %	92,82 %

5	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	80 %	96 %	98,46 %
6	Persentase Kab/Kota yang Mencapai IR DBD <49/100.000 Penduduk	90 %	55,55 %	98,32 %
7	Persentase Kab/Kota Sudah Eliminasi Malaria	93 %	93 %	97,68 %
8	Proporsi Cacat Kusta Tingkat II	< 10 %	6 %	97,61 %
9	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	45 %	27,27 %	98,97 %
10	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Rabies	88 %	88 %	90,90 %
11	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	55 %	51,69 %	98,80 %
12	Persentasi penduduk mengalami gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	74 %	88,44 %

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai outcome Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, tidak mencapai target yang diharapkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19 sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29

Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasilitas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

b) Persentase Pasien HIV yang di obati

Jumlah ODHA on ARV atau persentase pasien yang diobati di tahun 2019 hanya 40% dikarenakan belum semua faskes terdapat pengobatan ARV sedangkan di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2% pada pasien HIV yang diobati. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini pada masa Pandemi Covid 19 ini ialah tidak semua pasien mau datang ke Fasyankes, adanya pembatasan ODHA yang datang ke layanan Fasilitas Kesehatan, dan adanya keterlambatan stok ARV karena terjadi Pembatasan Sosial Bersekala besar di kab/Kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan logistic ke Kab/Kota, Bimbingan Teknis Pelayanan Perawatan 2 Dukungan pada ODHA, Validasi Data ODHA, dan Pelatihan Layanan PDP pada 190 Layanan.

c) Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%

Pada Tahun 2019, capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat mencapai 93.8% yang berarti telah melebihi 90%. Namun pada tahun 2020 capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat, data s.d Triwulan 3 baru mencapai 44.8%, belum mencapai target 2020 sebesar 90.5%. Hal ini sangat jauh dari pencapaian tahun 2019, karena mulai bulan Maret 2020 pelayanan imunisasi di Provinsi Jawa Barat sempat terganggu karena adanya Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi sempat terhenti karena adanya surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk tidak membuka Posyandu dan Puskesmas hanya untuk pelayanan orang sakit.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk menghentikan posyandu dan pelayanan imunisasi di puskesmas karena adanya Pandemi Covid-19 (sekitar bulan April-Mei), Petugas Imunisasi baik Pengelola Program Imunisasi di Kabupaten/Kota dan Koordinator Imunisasi di Puskesmas terlibat dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti ikut dalam tracing kontak dan pemegang data Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan imunisasi, orang tua khawatir membawa anaknya imunisasi karena takut tertular Covid-19, sempat kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pelayanan imunisasi.

Pada triwulan 4, sudah mulai disibukkan dengan persiapan imunisasi Covid-19 sehingga pekerjaan menjadi bertambah dan harus membagi waktu dengan kegiatan imunisasi rutin. Upaya

yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) Petugas Imunisasi ke Gugus Tugas Provinsi, melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) ke Pusat, melakukan koordinasi dengan pengelola program imunisasi Kab/Kota melalui zoom meeting, Membuat surat edaran mengenai petunjuk teknis pelayanan imunisasi selama masa Pandemi Covid-19, membagikan dan sosialisasi buku petunjuk teknis pelacakan anak yang belum diimunisasi (Defaulter Tracking) kepada Kab/Kota, dan berkoordinasi dengan lintas sector seperti gugus tugas, TP PKK dll untuk mendukung kegiatan imunisasi.

d). Peresntase Kab/Kota yang 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneumonia balita sesuai standar

Penurunan ini dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah, untuk realisasi 44,44% masih belum final dikarenakan masih menunggu laporan dari kabupaten kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tepat menjalankan pelayanan di Puskesmas secara optimal, pemberian/pendistribusian logistic berupa rapid test antibody ke 27 Kab/Kota, pendistribusian vitamin dan multivitamin ke 27 Kab/Kota dan RS yang ada di wilayah masing-masing, dan pembentukan RS SIBI di Kota Sukabumi tepatnya di RS R Syamsudin.

e) Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil

Dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tetap melaksanakan pelayanan DDHB di Puskesmas secara optimal, pemberian/ pendistribusian logistic berupa rapid test HbsAg dan HbIg ke 27 kab/kota, monitoring pelaksanaan pengendalian HPISP ke 6 kab/kota, Pelatihan SIHEPI di Kabupaten Purwakarta, Pertemuan Validasi Data HPISP untuk 27 kab/kota secara daring, dan Pertemuan Kegiatan Manajemen Zinc pada Balita Diare di Lokus Stunting di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.

f) Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk

Tahun 2019 realisasi 55,55% (sebanyak 15 kabupaten/kota dengan Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk), hal ini tahun 2019 data kasus di semua kabupaten/kota meningkat dibandingkan data tahun sebelumnya. dan kemudian pada tahun 2020 kasus DBD jumlahnya hampir di semua kabupaten/kota sama dengan tahun 2019, namun setelah di jumlah masih dibawah tahun lalu.

Untuk target tahun 2020 ada peningkatan kasus DBD di setiap Kabupaten/Kota, sehingga pencapaian tahun 2020 tidak sesuai target yaitu sebanyak 15 Kabupaten/Kota mencapai Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk. Justifikasi sebagai target adalah $IR \leq 49/100.000$ penduduk adalah Target global untuk pengendalian DBD adalah penurunan angka kasus 25 % pada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik belum optimal, Kurangnya Sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk program DBD, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian DBD, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam penganggaran program pencegahan dan penanggulangan DBD.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD, Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD, dan Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD.

g) Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria

Tahun 2019 realisasi 85% (sebanyak 23 kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi malaria), hal tersebut karena tidak ada kasus penularan setempat hanya kasus import saja, namun pada bulan April kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria sehingga pencapaian menjadi 93 %. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada 2 (dua) kabupaten yaitu kab sukabumi, pangandaran masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria, masih di temukan kasus malaria penularan setempat, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian Malaria, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam penganggaran program Penanggulangan dan pencegahan penyakit Malaria.

Tahun 2019 realisasi 85% (sebanyak 23 kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi malaria), hal tersebut karena tidak ada kasus penularan setempat hanya kasus import saja, namun pada bulan April kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria sehingga pencapaian menjadi 93 %. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada 2 (dua) kabupaten yaitu Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria, masih ditemukan kasus malaria penularan setempat, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas

program untuk pencegahan dan pengendalian Malaria, dan Masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam penganggaran program penanggulangan dan pencegahan penyakit Malaria.

i) Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis

Analisis penyebab kegagalan pencapaian indicator outcome dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Kegiatan Monitoring & Evaluasi dapat dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten/Kota karena tidak ada kendala yang berarti sama sekali sehingga kegiatan Survei Penilaian Kejadian/TAS dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Monitoring & Evaluasi dengan Survei Penilaian Kejadian/TAS pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dan pendanaan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut pada BBTCL-PP Kementerian Kesehatan digunakan untuk focusing penanganan Covid - 19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya pandemic Covid-19 sehingga banyak kegiatan untuk Monitoring dan Evaluasi Eliminasi Filariasis tidak bisa terlaksana terkait dengan peraturan yang tidak diperbolehkan mengumpulkan massa/kerumunan dan anak sekolah sebagai sasaran pemeriksaan antigen Filariasis harus belajar secara on line tidak tatap muka.

Anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan mengalami efisiensi mencapai sebesar 70%. Semua Kabupaten/Kota fokus pada penanganan Covid-19 sehingga kegiatan untuk meningkatkan upaya eliminasi Filariasis tidak berjalan sama sekali, dan terdapat beberapa petugas pengelola program Puskesmas maupun Kabupaten/Kota yang terinfeksi Covid-19 atau kontak erat dengan kasus Covid-19 sehingga banyak kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya/tertunda.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengadakan Pertemuan Koordinasi pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan pada masa pandemic Covid-19 secara Virtual, Bimbingan teknis Filariasis pada 2 Kab/kota dan bimbingan pengendalian cacingan pada 3 Kab/Kota, Pendampingan POPM Cacingan pada 18 Kab/Kota, Pemantauan POPM Cacingan pada 20 Kab/Kota, dan melakukan koordinasi terkait penemuan kasus dan tatalaksana kasus Filariasis pada 27 Kab/Kota, baik pada saat adanya permintaan narasumber Pertemuan di Kab/Kota maupun pada saat melakukan fasilitasi ke Kab/Kota.

j) Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies

Tahun 2019 Jawa Barat mempunyai 4 (empat) daerah endemis Rabies dan mempunyai target I (satu) kabupaten bisa mencapai eliminasi. Tahun 2019 target bisa di realisasikan dan 1 (satu) kabupaten/kota bisa eliminasi sehingga tahun 2020 Jawa Barat mempunyai 3 daerah endemis Rabies. Tahun 2020 di targetkan 1 (satu) kabupaten/kota bisa eliminasi tetapi target

tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga sampai akhir tahun 2020 masih mempunyai 3 daerah endemis rabies.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah kondisi pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kegiatan program zoonosis baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, anggaran untuk program Zoonosis di efisiensi kurang lebih sebesar 75%, begitu pula dengan anggaran untuk program Zoonosis di kabupaten/kota, dan semua tenaga, sarana di fokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah bimbingan teknis dan monitoring kegiatan pengendalian program Zoonosis ke 11 kabupaten/kota, pertemuan evaluasi program Zoonosis dan validasi data kasus Zoonosis di 27 Kabupaten/Kota secara Daring. Konsultasi program Zoonosis ke Subdit Zoonosis Kementerian Kesehatan RI, koordinasi lintas sektor dan lintas program, dan pemenuhan kebutuhan logistik program zoonosis untuk 27 kabupaten/kota.

k) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih banyak pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas yang belum terlatih, sering terjadi pergantian pengelola Program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas, dan pencatatan dan pelaporan di puskesmas melalui Portal Web belum optimal dikarenakan masih banyak pengelola program yang belum terlatih sehingga data bisa under reporting.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas melalui pelatihan pandu PTM dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Selain itu membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan, dan meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM.

l) Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Hasil capaian presentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan akses untuk pelayanan di puskesmas terbatas, hanya untuk pelayanan asidentil, kepatuhan penderita gangguan jiwa untuk berobat masih rendah, masalah kesehatan jiwa masih merupakan stigma di masyarakat, dan ketersediaan obat jiwa masih mengandalkan dari Kemenkes, untuk Kabupaten/Kota masih terbatas dalam penyediaan obat jiwa.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pertemuan virtual Orientasi Program Keswa bagi Petugas Kab/Kota dan Puskesmas yang telah diselenggarakan oleh Program Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pelatihan virtual Program Resiliensi Kesehatan Mental Pada Tenaga Kesehatan di Jawa Barat yang didukung oleh HOPE dan KUN, pertemuan virtual koordinasi dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa beserta pengelola program Keswa di Kab/Kota, dan Sosialisasi virtual untuk SISKEWA (Sistem Informasi Kesehatan Jiwa) Bagi Pengelola Program Keswa di Kab/Kota dan puskesmas.

Tabel 2.5
Capaian Indikator SPM Provinsi tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Kesehatan Akibat Bencana & Kesehatan Akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi			100,00 %
1	Persentase kegiatan Rapid Health Assesment	100 %	100 %	100,00 %
2	Persentase masyarakat yg dilayani di lokasi bencana	100 %	100 %	100,00%

Program kesehatan akibat bencana dan kesehatan akibat kejadian luar biasa (KLB) provinsi mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment

Pada tahun 2020 pelaksanaan Rapid Health Assesment (RHA) pada kondisi bencana alam masih dilaksanakan oleh tim RHA sesuai prosedur sehingga pemantauan dan atau pelayanan kepada masyarakat yang terdampak krisis masih berjalan walaupun kondisi sedang dalam Pandemi Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sehingga capaian tahun 2019 dan 2020 masih sesuai target.

Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 masih terbatasnya SDM dan banyaknya Petugas Kabupaten /Kota yang belum terlatih untuk melaksanakan RHA.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan KLB wabah bencana alam bidang kesehatan, pemantauan penyakit dan masalah kesehatan matra.

b. Persentase masyarakat yang dilayani dilokasi bencana

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019 dan 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan),

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak krisis tidak mengalami permasalahan yang berat, walaupun dengan kondisi pandemi covid-19 semua masyarakat dilokasi pengungsian dapat dilayani seluruhnya, hanya ada beberapa lokasi yang kekurangan APD dan obat namun langsung dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinkes Provinsi Jawa Barat, tidak berfungsi secara optimal kendaraan operasional roda empat dan roda dua milik program bencana. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan Tahun 2019 adalah salah satunya menyediakan stok Obat-obatan dan alat kesehatan yang dialokasikan untuk memfasilitasi Kab/Kota yang kekurangan pada saat terjadi bencana, mengajukan pengadaan kendaraan Operasional bencana pada Tahun anggaran 2021.

C. Program Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.6
Capaian Indikator Program Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN			78,97 %
1	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	100 %	94,92 %	94,69 %
2	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	30 %	85,20 %	
3	Persentase Kab/Kota Puskesmas sesuai standar	86 %	82 %	43,37 %
4	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	72 %	75,23 %	29,40 %.
5	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait layad rawat	48,15 %	100,0 %	79,53 %
6	Persentase RS siap Akreditasi	70,0 %	86,64 %	97,72 %
7	Persentase Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	100%	98,51 %

8	Persentase Kab/Kota yang mempunyai 80% RS dengan pencapaian SPM	33 %	-	99,08 %.
9	Persentase RS Regional yang memenuhi standar	50 %	-	

Program Pelayanan Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan Pengendalian Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Puskesmas siap akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas terakreditasi masih tetap (1.028 puskesmas) sedangkan pembagiannya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentase sebagai hasil pembagiannya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Pendampingan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun yang akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan optimal, melihat kondisi lapangan, bila ada kasus maka pendampingan tidak dilakukan, Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu. Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, dan Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Surveyor Akreditasi FKTP Jawa Barat, dan menindaklanjuti edaran kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

b). Persentase kab/kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi

Capaian persentase Kabupaten/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi pada tahun 2020 sebesar 85,20%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 masih sama sebesar

85,20%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (19%) ataupun target tahun 2020 (30%), sudah mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut, dan beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan pendampingan pasca akreditasi labkes, mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan.

c. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas sesuai standar masih tetap (888 puskesmas) sedangkan pembagiannya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentase sebagai hasil pembagiannya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas menjadi lebih fokus pada pemberian pelayanan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa Pandemi Covid 19, mengingat pada masa pandemi banyaknya masyarakat dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga anggaran untuk pemenuhan puskesmas sesuai standar banyak dialihkan untuk penanggulangan Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengintegrasikan dengan kegiatan Satgas Covid 19 kegiatan monitoring dan pembinaan ke puskesmas agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar pada masa pandemi, dan mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes terutama terkait pelayanan pada masa pandemi.

d) Persentase kab/kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan obat tradisional

Capaian persentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional pada tahun 2020 sebesar 75,23%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 adanya peningkatan sebesar 8,56% dari capaian 66,67%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (64%) ataupun target tahun 2020 (72%),

sudah mencapai target yang ditetapkan. Definisi operasional puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional adalah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain : a. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan (pemanfaatan taman obat keluarga) dan keterampilan (akupresur untuk keluhan ringan), b. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan, meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional, c. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional (akupuntur untuk dokter, akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya Pandemi Covid-19 menimbulkan efisiensi anggaran.

Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di tahun 2020 berkurang, dari 5 kegiatan menjadi 1 kegiatan karena adanya efisiensi anggaran, dan kegiatan dilaksanakan mendekati akhir tahun (September 2020). Kegiatan yang tidak dapat terlaksana tahun 2020 antara lain : Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional, Pertemuan Validasi dan Sinkronisasi Data program Pelayanan kesehatan Tradisional, Sosialisasi SP3T Provinsi Jawa Barat, Konsolidasi Penapisan dan Pengembangan Penyehat Tradisional (SP3T) Yankestrad, dan kegiatan yang dapat terlaksana tahun 2020 adalah monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL, akan tetapi kegiatan ini terlaksana di 15 kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota yang dialokasikan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL di 15 Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta, menindaklanjuti surat edaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta Nomor HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit dan Perawatan Kesehatan, Surat Nomor HK.01.07/IV/870/2020 tentang Protokol Kesehatan Pelayanan SPA dan salon di Era New Normal Pandemi Covid-19, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e) Persentase kab/kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait Layad Rawat

Tahun 2019 kegiatan Layad Rawat di Provinsi adalah melengkapi kegiatan Layad Rawat berupa pemenuhan regulasi yaitu dengan tersusun dan ditetapkannya nya Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layad rawat di Provinsi Jawa Barat, Petunjuk Teknik

Pelaksanaan Layad Rawat, serta pembahasan kerja sama dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor tentang Pelaksanaan Layad Rawat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layad Rawat di 27 Kabupaten/kota, advokasi keberlangsungan kegiatan Layad Rawat di Kab/Kota.

f) Persentase Rumah Sakit siap Akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 RS (hanya bertambah 2 RS bila dibandingkan capaian akhir th 2019) sedangkan pembaginya (jumlah Rumah Sakit teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 376) sehingga mempengaruhi persentasi sebagai hasil pembaginya, tetapi bila dibandingkan dengan target Rumah Sakit terakreditasi tahun 2020 (68,99%) sudah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan (86,65%).

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS, menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

g) Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi

Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan visitasi ke rumah sakit, jika hasil visitasi sesuai dengan standar maka rekomendasi akan di buat dan di sampaikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Semua permohonan yang masuk ke dinkes dari DPMPTSP sudah dilakukan visitasi dan sudah dibuatkan rekomendasinya. Jumlah permohonan sebanyak 17 RS dari DPMPTSP dan semuanya sudah dilakukan visitasi dan diberikan rekomendasi.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah jika sudah mendekati akhir tahun dana untuk visitasi sudah tidak ada lagi. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah dilakukan visitasi dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakitnya.

h) Persentase kab/kota yang mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

i) Persentase Rumah Sakit Regional yang memenuhi standar.

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

D. Program Sumber daya Kesehatan (SDK)

Program Sumber Daya Kesehatan mempunyai *outcome* meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator *outcome* :

Tabel 2.7

Capaian indikator Program Sumber Daya Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Sumber Daya Kesehatan			83,63 %
1	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	91 %	91,12 %	95,50 %
2	Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan (Persentase dokumen BA Cabang distribusi alkes)	90 %	87,52 %	96,80 %
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	75 %	75 %	65,59 %.
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	70 %	70 %	85,53 %
5	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	75 %	0 %	100 %
6	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	90 %	85,51 %	100 %
7	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI Ke Kab/Kota	40 %	40 %	100 %

a). Persentase Ketersediaan Obat Esensial

Target Persentase Ketersediaan Obat Esensial pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kenaikan jumlah item obat yang menjadi indikator Ketersediaan Obat Esensial dari semula 20 jenis item obat menjadi 40 jenis item obat, sehingga target di tahun 2020 menjadi 91%. Realisasi Persentase Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 92,12% pada tahun 2020 terdapat penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 94,33%. Namun masih dapat melebihi target yang telah di tentukan. Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada dipuskesmas, obat wajib tersebut semula sebanyak 20 jenis item tetapi sekarang yang diwajibkan sebanyak 40 jenis item, dengan rincian obat : Albendazol /Pirantel Pamoat, Alopurinol, Amlodipin/Kaptopril, Amoksisilin 500 mg, Amoksisilin sirup, Antasida tablet kunyah/ antasida suspensi, Asam Askorbat (Vitamin C), Asiklovir, Betametason salep, Deksametason tablet/deksametason injeksi, Diazepam injeksi 5 mg/ml, Diazepam, Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin, Difenhidramin Inj. 10 mg/ml, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl), Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam Oralit serbuk, Glibenklamid/Metformin, Hidrokortison krim/salep, Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi, Lidokain inj, Magnesium Sulfat injeksi, Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml, Natrium Diklofenak, OAT FDC Kat 1, Oksitosin injeksi, Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml, Parasetamol 500 mg, Prednison 5 mg, Ranitidin 150 mg, Retinol 100.000/200.000 IU, Salbutamol, Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik, Simvastatin, Siprofloksasin, Tablet Tambah Darah, Triheksifenidil, Vitamin B6 (Piridoksin), dan Zinc 20 mg.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pada tahun 2020 terdapat penambahan jenis obat yang menjadi Indikator Ketersediaan Obat Esensial dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mensosialisasikan kepada Kab/Kota untuk menambahkan jenis obat yang menjadi indikator ketersediaan obat dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

b) Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan.

Pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi untuk persentase rekomendasi perijinan yang di keluarkan, adapun realisasi pada tahun 2019 adalah 87,77% dan pada tahun 2020 adalah 87,52%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mengakibatkan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan sarana di batasi.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk dapat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi proses perizinan terkait izin PBF Cabang, PAK dan UKOT

untuk dapat di proses dengan semaksimal mungkin proses perizinan dapat terakomodir dengan baik.

c) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan

Dalam Pengelolaan Mutu Tenaga terdapat beberapa program di dalamnya yaitu kegiatan pengelolaan Data SDM, data rencana kebutuhan, Tubel reguler, Tubel Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Legalisir STR, Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR TTK), Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS), Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan TKWNA. Meskipun terdapat efisiensi anggaran di tahun 2020, kegiatan mutu SDM dapat dilaksanakan melalui kegiatan zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan kegiatan virtual yang diselenggarakan melalui DPA Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan. Kegiatan Virtual tetap mencapai output yang ditargetkan di tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah secara kualitas bermasalah karena keterbatasan interaksi. Terdapat masalah komunikasi yang disebabkan mekanisme virtual dan pemenuhan berkas secara online. Keterbatasan pendampingan secara klasikal yang mengurangi kualitas pemahaman sasaran program.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memastikan virtual zoom meeting dengan evaluasi mekanisme pelaksanaannya agar meningkatkan kuantitas dan kualitas penyampaian informasi program. Dengan melaksanakan kegiatan tambahan virtual meeting pada kegiatan program yang bersifat teknis program.

d) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan

Berkurangnya jumlah nakes Non PNS tahun 2019 sebanyak 940 menjadi 852 untuk tahun 2020 disebabkan karena mengundukan diri dengan alasan karena diterima CPNS. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tidak dapat mengevaluasi kinerja secara langsung pada peserta Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat yang bertugas di 27 Kabupaten/ Kota baik yang bertugas di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah evaluasi kinerja didelegasikan langsung ke atasan langsung peserta tenaga kesehatan non PNS Provinsi Jawa Barat dan memanfaatkan aplikasi online sebagai sarana di masa pandemi untuk evaluasi kinerja.

e) Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan

Untuk indikator persentase tenaga kesehatan mengikuti pemilihan tenaga kesehatan puskesmas teladan Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran hampir 100% sehingga kegiatan

nakes teladan ditiadakan. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Refokusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga kegiatan nakes teladan ditiadakan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemberian penghargaan bagi tenaga relawan dan tenaga nakes non pns yang mengundurkan diri dengan memberikan surat keterangan masa bakti.

f) Persentase Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan

Pada indikator persentase penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan terjadi kenaikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, tapi untuk tahun 2020 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan sampai sepuluh tahap dari Kementerian Sosial sehingga sangat mempengaruhi jumlah kepesertaan dan capaian Universal Health Coverage. Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait Jaminan Kesehatan dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan sosialisasi kepada pihak terkait tentang regulasi Perpres No 64 tahun 2020 dan Permendagri No.64 tahun 2020, koordinasi Lintas Sektor, koordinasi evaluasi Pembiayaan Kesehatan dan Penyusunan PHA/DHA (p).

g) Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kab/Kota

Target Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota tiap tahun 2019 dan tahun 2020 sama sebesar 40% sesuai dengan pergub No. 62 tahun 2015, Realisasi Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 40%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tahun 2020 keluar regulasi baru terkait besaran premi, sehingga ada perhitungan kebutuhan yang disesuaikan dengan regulasi tersebut, dan sebagian penganggaran masuk ke perubahan sehingga baru bisa dicairkan oleh kab/kota di akhir desember.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah koordinasi dengan BPKAD dan Kabupaten/Kota untuk proses pencairan dan pemanfaatan dana alokasi.

E. Program Manajemen Kesehatan

Tabel 2.8
Capaian Indikator Program Manajemen Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Manajemen Kesehatan			
1	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27	27	100 %

Program Manajemen Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya layanan manajemen kesehatan, dengan indikator outcome :

- a) Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat. Untuk indikator Persentasi Draf Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ialah sebanyak 7 Dokumen Draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, 7 dokumen tersebut ialah:
 - a. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Hospital By Laws (HBL) Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
 - b. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat masa Tugas 2020
 - c. Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat
 - d. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat
 - e. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
 - f. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

- g. Draft Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.1359-1359-Dinkes/2018 tentang keanggotaan badan pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
- b) Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Telah dilakukan pembinaan terkait Pelaksanaan BOK di kab-kota melalui evaluasi pelaksanaan setiap triwulan. Dimana kab/kota melaporkan hasil evaluasi per triwulan melalui aplikasi e-renggar milik Kementerian Kesehatan yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi ini diserahkan atau diteruskan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar sebagai bahan pertimbangan Kementerian Kesehatan terkait usulan perencanaan tahun berikutnya.

2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Triwulan II

Tabel 2.9

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Menurunnya Kasus stunting di Jawa Barat	1.383.993.213	1.198.111.504	86,57%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	2.409.129.932.015	2.077.241.589.272	86,22 %
	2.410.513.925.228	2.078.439.700.776	86,22 %

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran untuk sasaran Renstra Dinas Kesehatan rata-rata berada di angka 85%. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasi 100 persen anggaran tersebut antara lain kondisi pandemi yang menyebabkan sumberdaya Kesehatan baik sumberdaya manusia, sarana prasarana, waktu, dan sumberdaya lainnya lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 terutama pada awal-awal tahun 2021. Hal ini menyebabkan realisasi di awal tahun tidak sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, setelah berakhirnya puncak pandemi di semester pertama, akselerasi realisasi kegiatan terus dilakukan tetapi karena waktu dan SDM yang terbatas, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sampai dengan 100%.

Rata- Rata capaian indikator kinerja program ini adalah 99,01 % dengan predikat Tinggi. Dari 55 indikator kinerja, 47 indikator telah mencapai/melebihi target dan 8 indikator belum

mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja yang belum mencapai target (< 100%) sebanyak 8 indikator kinerja terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi
 - b. Ratio Kematian Ibu
 - c. Presentase capaian SPM (RSUD AL IHSAN)
 - d. Presentase capaian SPM (RS JIWA)
 - e. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RS KESEHATAN KERJA)
 - f. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan (RSUD Pameungpeuk)
 - g. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSKK)
 - h. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSJ)

2. Realisasi Indikator Kinerja yang telah mencapai target (= 100%) sebanyak 19 indikator kinerja terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
 - c. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
 - d. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat
 - e. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)
 - f. Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
 - g. Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan
 - h. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RSUD AL IHSAN)
 - i. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RSUD JAMPANGKULON)
 - j. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RSUD PAMEUNGPEUK)
 - k. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RS PARU)
 - l. Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment (RS JIWA)
 - m. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas
 - n. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan (RSJ)
 - o. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan (RSKK)
 - p. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan (RSUD Pameungpeuk)

- q. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSUD Jampangkulon)
- r. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum
- s. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

3. Realisasi Indikator Kinerja yang melebihi target (>100%) sebanyak 28 indikator kinerja terdiri dari indikator:

- a. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
- b. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar
- c. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional
- d. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
- e. Persentase Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi
- f. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas
- g. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat
- h. Ratio Kematian Bayi
- i. Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia
- j. Presentase capaian SPM (RS PARU)
- k. Presentase capaian SPM (RS KESEHATAN KERJA)
- l. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
- m. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- n. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)
- o. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- p. Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru
- q. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan (RS Paru)
- r. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (Upelkes)
- s. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSUD Al Ihsan)
- t. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target Indikator kinerja :

- a. Proses adaptasi pelaksanaan kegiatan dalam situasi pandemi Covid-19 cukup berdampak pada beberapa capaian kinerja diantaranya pelaksanaan kegiatan akreditasi yang tertunda,

- penilaian cakupan pelayanan kesehatan yang terdampak, dan pelatihan-pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan.
- b. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan kasus di beberapa daerah di Jawa Barat tidak hanya berdampak pada penduduk masyarakat secara global namun juga termasuk kematian ibu.
 - c. Kemampuan beradaptasi dengan situasi pandemi menjadi salah satu nilai tambah untuk beberapa kinerja yang tercapai dan bahkan melebihi target. Kegiatan-kegiatan yang tetap bisa dilaksanakan melalui daring sehingga koordinasi tetap berjalan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja perlu penyesuaian dengan Nomenklatur kegiatan sesuai aturan baru dengan definisi operasional yang baru berdampak pada keterhambatan pencapaian target.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab di atas antara lain:
- a. Kebijakan perencanaan dan penganggaran selain focus pada kebutuhan penanganan Covid-19 juga fokus untuk pelaksanaan SPM baik SPM provinsi maupun kab/kota dan dukungan kegiatan terhadap ketercapaian IKU Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat.
 - b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran bersumber dana lain seperti APBN, DBHCHT, CSR, dan lainnya untuk mendukung kegiatan yang belum terbiayai APBD.
6. Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah: Memperhatikan data di atas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan adalah antara lain adalah :
- a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, pelaksanaan SPM di kabupaten/kota pun terus mengalami kenaikan artinya walaupun dalam kondisi pandemic Covid-19 kab/kota tetap melaksanakan pelayanan SPM di puskesmas, peningkatan persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju UHC, penurunan rasio kematian bayi. Namun demikian, yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan status akreditasi fasilitas Kesehatan di Jawa Barat karena kualitas pelayanan harus tetap dipertahankan baik bahkan harus lebih baik lagi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan farmasi, alat Kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketersediaan obat esensial di puskesmas, jumlah sarana dan prasarana seperti alat Kesehatan, alat kedokteran yang semakin meningkat di faskes baik kab/kota maupun rumah sakit provinisi.
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan kabupaten yang ada di Jawa Barat terutama kabupaten yang berada di Jawa Barat bagian selatan maupun perbatasan dengan provinsi lain terutama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah yaitu masih ditemukan kesenjangan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Pemenuhan rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter spesialis, yang bekerja di rumah sakit terhadap jumlah penduduk dan pemenuhan rasio jumlah tempat tidur terhadap jumlah penduduk menjadi sangat penting terutama di wilayah perbatasan dan wilayah Jawa Barat Selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun 2022 dengan tema "Penguatan Perekonomian Wilayah untuk Meningkatkan Masyarakat di Kawasan Perbatasan" diadakan di Hotel Santika Kota pada tanggal 24 Februari tahun 2022, telah diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 17 (tujuh belas) ruang lingkup kerja sama yang mengusulkan rencana kerja/kegiatan kerja sama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah tahun 2023;

2. Terdapat 111 (seratus sebelas) usulan rencana kerja/kegiatan dari 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kerja sama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian :
 - a. 58 (lima puluh delapan) usulan rencana kerja/kegiatan dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Terlampir);
 - b. 53 (lima puluh tiga) usulan rencana kerja/kegiatan dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Terlampir);
3. Pendanaan usulan rencana kerja/kegiatan kerja sama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan APBD Provinsi Jawa Tengah, serta sumber pendanaan alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menganggarkan untuk 2 lingkup kegiatan. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Rabies/GHPR dengan pendekatan One Health dengan target lokasi 2 Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 67.324.000. Serta Kegiatan penemuan kasus Kusta atau ICF Kusta dengan lokasi Kota/Kabupaten Brebes sebesar Rp. 296.170.000.

Selain itu telah dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya adaptasi terhadap situasi pandemi covid-19 melalui program Jawa Barat Juara (Jabar Juara), yaitu:

a. Layad rawat

Layad rawat merupakan program pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya ke rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan pelaporan dan panggilan darurat melalui telepon (*Hotline*) atau media online lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Puskesmas Juara

Puskesmas juara adalah menciptakan puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terakreditasi serta menjadi tambahan ketersediaan sumberdaya kesehatan dalam menghadapi kebencanaan daerah. Pada masa pandemic covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program PUSPA yang bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat. Program PUSPA berupaya menerjemahkan nilai-nilai keilmiah, inovasi, dan juga kolaborasi. Program ini merekrut tenaga kesehatan sebagai *Field Officer* yang ditugaskan di di puskesmas-puskesmas di kota/kabupaten di Jawa Barat.

c. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit

Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah kabupaten/kota terutama di daerah perbatasan yang menjadi kewajiban provinsi, pengembangan pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan dan pusat kegiatan lokal, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan / pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, merevitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan melakukan revitalisasi rumah sakit tipe C menjadi tipe B.

d. Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 Triwulan 2

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (triwulan 2)	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota	V	V	N/A	67,63	68,92	70,58	66,36	73,70	75,00	75,25	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT		V	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26-83,75	N/A	81,99	85,51	83,00	
3	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna		V	N/A	3	3	4	N/A	3	3	4	
4	Prevalensi Stunting		V	25.2%	23,20%	21,20%	19,20%	26.21%	24,50	23,20%	21,20%	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

1) Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan SPM di kabupaten/kota, Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar pasal 22 dikatakan bahwa Gubernur melakukan

pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota sehingga melalui Dinas Kesehatan dengan indikator ini bersama-sama kabupaten/kota mengawal dalam penerapannya. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021, rata-rata ketercapaian pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota adalah sebesar 74,66% dengan capaian tertinggi adalah Kota Cimahi yaitu sebesar 99%. Sedangkan untuk capaian terendah adalah Kota Tasikmalaya dengan nilai sebesar 42,15% (karena belum menyampaikan ketercapaian sampai dengan triwulan 4). Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 74,66% melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 67,63%. Hal ini dapat tercapai karena kasus Covid-19 di Jawa Barat sudah mulai konsisten melandai sehingga kabupaten/kota mulai fokus kembali melakukan pelayanan SPM nya secara optimal.

Tabel 2.11
Data Ketercapaian Pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA (%)	KETERANGAN
1	Kabupaten Bogor	73,32	TW 4
2	Kabupaten Bekasi	76,88	TW 4
3	Kabupaten Sukabumi	76,58	TW 4
4	Kabupaten Cianjur	56,99	TW 4
5	Kabupaten Karawang	66,99	TW 4
6	Kabupaten Purwakarta	88,47	TW 4
7	Kabupaten Subang	74,38	TW 4
8	Kabupaten Cirebon	68,01	TW 4
9	Kabupaten Indramayu	73,85	TW 4
10	Kabupaten Kuningan	76,14	TW 4
11	Kabupaten Majalengka	85,34	TW 4
12	Kabupaten Sumedang	86,54	TW 4
13	Kabupaten Bandung	67,52	TW 4
14	Kabupaten Bandung Barat	60,69	TW 4
15	Kabupaten Garut	74,07	TW 4

16	Kabupaten Tasikmalaya	89,77	TW 4
17	Kabupaten Ciamis	76,34	TW 4
18	Kabupaten Pangandaran	91,89	TW 4
19	Kota Depok	65,09	TW 4
20	Kota Bekasi	64,59	TW 4
21	Kota Cirebon	92,11	TW 4
22	Kota Bandung	70,07	TW 4
23	Kota Cimahi	99,59	TW 4
24	Kota Banjar	75,78	TW 4
25	Kota Sukabumi	75,13	TW 4
26	Kota Bogor	75,40	TW 4
27	Kota Tasikmalaya	42,15	Belum melaporkan TW 3&4

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota adalah :

1. Pelaporan dari kabupaten/kota yang tidak tepat waktu.
2. Proses pengumpulan data terkendala oleh aplikasi yang digunakan oleh Kabupaten/Kota.
3. Data yang tidak konsisten antar 2 aplikasi kementerian yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri
4. Koordinasi antara pemegang program dan pengolah data program yang belum terlaksana dengan baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Pertemuan dengan mengundang narasumber pemilik aplikasi SPM
2. Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data di Kabupaten/Kota
3. Pendampingan dan pembinaan yang terus menerus

Selain dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Kab/Kota, Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Kesehatan Provinsi yang lokasi kegiatan berada di Kab/Kota.

Untuk ketercapaian SPM Provinsi, berdasarkan hasil koreksi tahun 2022, pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi

bencana alam dan situasi KLB dapat dilaksanakan 100%, dengan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan sebagai berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja SPM Provinsi Bidang Kesehatan tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2022(%)	Target Realisasi Triwulan 2 2022(%)
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan /atau berpotensi bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 % (427 Jiwa)	100 % terlayani (427 Jiwa)
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah Warga Negara pada Kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%
	Difteri	100% Difteri = 52 Kasus	100% Difteri = 39 Kasus
	Pertusis	100% Pertusis = 1	100% Pertusis = 1
	Covid-19	Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif : 403.338 Dengan rincian : 1. Kasus masih aktif : 18 2. Jumlah Kasus Sembuh : 399.254 3. Jumlah Kasus Meninggal : 1.115 Tertangani 100%	Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif : 403.338 Dengan rincian : 1. Kasus masih aktif : 18 2. Jumlah Kasus Sembuh : 399.254 3. Jumlah Kasus Meninggal : 1.115 Tertangani 100%

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 adalah 81,99 dengan kategori baik. Nilai IKM mengalami

peningkatan sebesar 1,77 dari tahun 2020 dimana nilai IKM yang dicapai pada tahun 2020 adalah 80,22. Capaian nilai IKM tertinggi pada UPT Upelkes dengan nilai 88,55 sedangkan capaian terendah dengan nilai 78,76 adalah Rumah Sakit Paru (RSP).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kendala teknis yang dihadapi adalah proses pelaksanaan yang lebih dari jadwal yang ditentukan karena kondisi pandemi sehingga berdampak kepada jumlah pengunjung yang menjadi responden.

Permasalahan mengenai hasil pelayanan yang diukur, dari 9 unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian adalah unsur pemenuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai keinginan responden meskipun telah memenuhi standar.

3) Jumlah RS Provinsi yang Terakreditasi Paripurna

Target RS Provinsi yang terakreditasi Paripurna di tahun 2021 sebanyak 3 RS yaitu RSUD Al Ihsan, RS Jiwa, dan RS Paru Sidawangi. Capaian ini telah sesuai dengan target pada tahun 2021 dan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mengingat kondisi pandemi yang terjadi sehingga proses pelaksanaan akreditasi ditunda.

4) Prevalensi Stunting

Indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, sehingga semakin rendah kejadian (angka yang dicapai) maka penilaian kinerjanya semakin baik. Berdasarkan realisasi pencapaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 24,20%, hal ini berarti bahwa capaian prevalensi stunting tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23,20%. Ketercapaian indikator prevalensi stunting sangat dipengaruhi oleh intervensi sensitif yang dilakukan oleh sektor di luar kesehatan sehingga memerlukan penguatan di dalam pelaksanaannya.

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) didukung dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana capaian indikator kinerja Program seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III
Tahun 2021 dan Tahun 2022 s/d Triwulan 2

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI Tahun 2021	CAPAIAN	TARGET 2022	REALISASI Tahun 2022 (Triwulan 2)	CAPAIAN
1	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	89%	98,62%	110,81	91%	35,87%	40,30
2	Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90%	87,79%	97,54	90%	87,79%	97,54
3	Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85%	90,00%	105,88	85%	85,53%	100,62
4	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	63%	63%	100,00	83%	80%	100,00
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
6	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	91%	95,18%	99,15	96%	95,18%	99,15
7	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	70%	88,95%	98,83	90%	88,95%	98,83
8	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	90%	87,91%	92,54	95%	88,83%	93,51
9	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	73,27%	100,00%	124,70	80,19%	100,00%	124,70

10	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	90%	91,77%	96,60	95%	91,77%	96,60
11	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	80%	82,45%	82,45	100%	82,45%	82,45
12	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
13	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	45%	46,03%	76,72	60%	46,03%	76,72
14	Persentase Kab/Kota memiliki fasilitas kesehatan lain yang terakreditasi	80%	85,18%	94,64	90%	85,18%	94,64
15	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	91,67%	25%	25,00	100%	75%	75,00
16	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
17	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	59%	59%	100,00	59%	59%	100,00
18	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan sesuai standar	80%	81%	101,25	80%	81%	101,25

19	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	87%	95,97%	109,06	88%	95,97%	109,06
20	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	92,60%	96,29%	103,98	92,60%	96,29%	103,98
21	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	72%	72%	100,00	90%	72%	80,00
23	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	50%	50%	100,00	75%	63%	84,44
22	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (Labkes)	75%	37,50%	50,00	75%	75%	100,00
24	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (Upelkes)	4,57%	4,11%	90,00	4,57%	4,35%	95,19
25	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RS JIWA)	60%	46%	76,67	60%	53%	88,33
26	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSUD PAMEUNGPEUK)	85,71%	75%	87,74	85,71%	52%	61,21
27	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSKK)	30%	30%	100,00	30%	40%	133,33
28	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis (RSUD JAMPANGKULON)	75%	21%	28,00	75%	21%	28,00
29	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) (RSUD PAMEUNGPEUK)	9 Hari	2,48 Hari	362,90	9 Hari	3,95 Hari	227,85

30	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) (RSJ)	21 Hari	15,59 Hari	134,70	21 Hari	15,59 Hari	134,70
31	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)(RSKK)	9 Hari	3,12	288,46	9 Hari	3,12	288,46
32	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) (RS Paru)	9 Hari	9	100,00	9 Hari	9	100,00
33	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) Al Ihsan	9 Hari	3 hari	300,00	9 Hari	3 hari	300,00
34	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)(RSUD JAMPANGKULON)	9 Hari	2,65	339,62	9 Hari	2,65	339,62
35	Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru	70%	90%	112,50	80%	90%	112,50

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Selain evaluasi prpgram regular, di bawah ini kami sampaikan evaluasi penyerapan anggaran SKTM sampai dengan triwulan 2, seperti di bawah ini :

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi TW 2	Penyerapan Triwulan 2 (%)	Realisasi TW 3	Penyerapan Triwulan 3 (%)
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	353,361,219,960	59,280,793,600	16.78	254,003,229,733	71.88
2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD Pameungpeuk)	7,000,000,000	1,380,341,132	19.72	2,908,772,994	41.55
3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSKK)	100,000,000	61,936,744	61.94	61,936,744	61.94
4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD Jampangkulon)	7,543,900,000	1,041,730,206	13.81	1,614,685,120	21.40
5	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RS Jiwa)	3,500,000,000	544,734,545	15.56	1,977,471,797	56.50
6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RS Paru)	500,000,000	113,151,064	22.63	255,391,439	51.08
7	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD Al Ihsan)	10,000,000,000	-	-	9,827,688,306	98.28
		382,005,119,960	62,422,687,291	16.34	270,649,176,133	70.85

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 setelah mempertimbangkan kinerja Dinas Kesehatan dengan rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Hasil review antara rancangan awal Renja Dinas Kesehatan dengan rancangan awal RKPD tidak menunjukkan perbedaan antara program dan kegiatan serta sub kegiatan. Hanya ada perbedaan pada penetapan pagu indikatif dan kebutuhan awal Dinas Kesehatan.

Tabel 2.14
Review terhadap rancangan RKPD tahun 2022
Provinsi Jawa Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS KESEHATAN					1.722.325.555.673	DINAS KESEHATAN					
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91 %		
	1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27 Kab Kota		1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27 Kab Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83 %		

	2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota		2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		3. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		3. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100 %		
	3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab / Kota		3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 kab/kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		4. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		4. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian			

	KESEHATAN MASYARAKAT		Luar Biasa Provinsi			KESEHATAN MASYARAKAT		Luar Biasa Provinsi			
	4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	7 buah		4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	7 buah		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		5. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		5. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	100 %		
	5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / Kota		5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			

	6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / kota		6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		7. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	80 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		7. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	80 %		
	7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7. Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS		7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7. Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		8. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		8. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95 %		
	8. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8. Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%	25 Dokumen		8. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8. Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%	25 Dokumen		

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		9. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		9. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100 %		
	9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Kab / Kota		9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	100 %		
	10. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab / Kota		10. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		11. Persentase Kabupaten/ Kota yang	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		11. Persentase Kabupaten/ Kota yang	100 %		

	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		melaksanakan Surveilans Gizi			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		melaksanakan Surveilans Gizi			
	11. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		11. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		12. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80,19		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		12. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80,19		
	12. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		12. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		1,338,658,244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		1,338,658,244	
	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan		515860000	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan		515860000	

	Kesehatan Usia Produktif		Mengenai Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			Kesehatan Usia Produktif		Mengenai Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		1.222.273.239	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		1.222.273.239
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan STBM dan PKAM			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan STBM dan PKAM		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Kabupaten/Kota yang TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) nya dilakukan pembinaan dalam rangka pengawasan higiene sanitasi pengelolaan kesehatan haji			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Kabupaten/Kota yang TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) nya dilakukan pembinaan dalam rangka pengawasan higiene sanitasi pengelolaan kesehatan haji		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya		

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Kab/Kota yang mencapai target upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Kab/Kota yang mencapai target upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinkes Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan ODGJ sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinkes Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan ODGJ sesuai standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Jumlah Kabupaten kota yang mempunyai rehabilitasi medis napza			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Jumlah Kabupaten kota yang mempunyai rehabilitasi medis napza			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Jumlah rekomendasi berupa data informasi identifikasi kebutuhan hasil Rapid Health Assesment			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Jumlah rekomendasi berupa data informasi identifikasi kebutuhan hasil Rapid Health Assesment			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Kab/Kota melaporkan data Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Kab/Kota melaporkan data Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Discarded rate Campak dalam			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Discarded rate Campak dalam			

			upaya Eliminasi Campak				upaya Eliminasi Campak			
			Jumlah Kab/Kota mencapai target AFP rate 2/100.000 anak usia < 15 tahun				Jumlah Kab/Kota mencapai target AFP rate 2/100.000 anak usia < 15 tahun Jumlah Respon Alert SKDR			
			Jumlah Respon Alert SKDR							
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang terkait puskesmas sesuai standar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang terkait puskesmas sesuai standar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan			
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kab/Kota yang capaian kepesertaannya lebih dari 75%			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang capaian kepesertaannya lebih dari 75%			

	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		13. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		13. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90 %	
			14. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85 %				14. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85 %	

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan	25 Kab / Kota	2,303,359,265,303	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan	25 Kab / Kota	2,303,359,265,303	
1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program			1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program			
2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Jumlah Dokumen Pengembangan Software / Aplikasi yang digunakan yang telah dilakukan Maintenance Sesuai Kebutuhan data			2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Jumlah Dokumen Pengembangan Software / Aplikasi yang digunakan yang telah dilakukan Maintenance Sesuai Kebutuhan data			
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan		Jumlah Dokumen Ketersediaan Alat Pemeriksaan Gula darah dan Kolesterol untuk Deteksi dini Faktor risiko PTM pada ASN di provinsi Jawa Barat			3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan		Jumlah Dokumen Ketersediaan Alat Pemeriksaan Gula darah dan Kolesterol untuk Deteksi dini Faktor risiko PTM pada ASN di provinsi Jawa Barat			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		15. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	92 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		15. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	92 %		

	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	25 Kab / Kota		2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	25 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		16. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	100 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		16. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	100 %		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 sistem		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 sistem		
	1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Penguatan Sistem Pencatatan Data Rutin Program			1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Penguatan Sistem Pencatatan Data Rutin Program			
			17. Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	60 %				17. Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	60 %		
			18. Persentasi Rumah Sakit Terakreditasi	90 %				18. Persentasi Rumah Sakit Terakreditasi	90 %		

			19. Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	90 %			19. Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	90 %		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	23 kab / kota		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	23 kab / kota		
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan			
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	14 Kab / Kota		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	14 Kab / Kota		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	14 Kab / Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	14 Kab / Kota		
II I	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN		1. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar	88 %		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	1. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar	88 %		

	MAKANAN MINUMAN		Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			MAKANAN MINUMAN		Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	50		Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	50		
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Gernas	100 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Gernas	100 %		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab Kota		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab Kota		

	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab		
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86,60		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86,60		
			2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %				2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		
			3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %				3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 Dokumen		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 Dokumen		
	Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	4 laporan		Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	4 laporan		

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS AL-IHSAN))		1. PERSENTASE BOR	85		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS AL-IHSAN))		1. PERSENTASE BOR	85		
			2. NET DEATH RATE PERMIL	< 25‰				2. NET DEATH RATE PERMIL	< 25‰		
			3. WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	< 5				3. WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	< 5		
			4. PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	4,7 ‰				4. PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	4,7 ‰		

			5. GROSS DEATH RATE PERMIL	<45‰			5. GROSS DEATH RATE PERMIL	<45‰		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	470942 pasien			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	470942 pasien	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	Rp. 387,354,559,82 7			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	Rp. 387,354,559,82 7	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		PERSENTASE BOR	56			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	PERSENTASE BOR	56	

MASYARAKAT (RS JIWA)					MASYARAKAT (RS JIWA)					
		NET DEATH RATE PERMIL	0				NET DEATH RATE PERMIL	0		
		WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	< 5				WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	< 5		
		PERSENTASE PASIE YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	0				PERSENTASE PASIE YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	0		
		GROSS DEATH RATE PERMIL	0				GROSS DEATH RATE PERMIL	0		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	1		
PROGRAM PENINGKATAN		Persentase SDM Kesehatan yang	100 %		PROGRAM PENINGKATAN		Persentase SDM Kesehatan yang	100 %		

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat Pelatihan Strategis			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat Pelatihan Strategis			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	33 Laporan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	33 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	14 Laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	14 Laporan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	27,654,840,642		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	27,654,840,642		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS PARU)		PERSENTASE BOR	35		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS PARU)		PERSENTASE BOR	35		
			NET DEATH RATE PERMIL	≤ 0,24 %				NET DEATH RATE PERMIL	≤ 0,24 %		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	≤ 5				WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	≤ 5		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	≤ 1,5 %				PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	≤ 1,5 %		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	45/1000				GROSS DEATH RATE PERMIL	45/1000		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		

	UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
						Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	92.6 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	92.6 %		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penderita TB hasil Jejaring eksternal TB di wilayah Kerja RS Paru	500 pasien		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penderita TB hasil Jejaring eksternal TB di wilayah Kerja RS Paru	500 pasien		

	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	13230 pasien		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	13230 pasien		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	8 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	8 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD			Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS Jampangkulon)		PERSENTASE BOR	70%		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS Jampangkulon)		PERSENTASE BOR	70%		
			NET DEATH RATE PERMIL	14‰				NET DEATH RATE PERMIL	14‰		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	5				WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	5		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	0.01%				PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	0.01%		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	20‰				GROSS DEATH RATE PERMIL	20‰		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat		Jumlah Pasien yang mendapatkan	43219 pasien		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat		Jumlah Pasien yang mendapatkan	43219 pasien		

	Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Pelayanan Kesehatan			Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Pelayanan Kesehatan		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	75 %		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	75 %	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 org		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 org	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 orang		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RS Jampangkulon)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RS Jampangkulon)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 persen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan	12 bulan	

			administrasi umum yang akuntabel				administrasi umum yang akuntabel			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	55,000,000,000			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	55,000,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSKK)		PERSENTASE BOR	75%			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSKK)	PERSENTASE BOR	75%	
			NET DEATH RATE PERMIL	5				NET DEATH RATE PERMIL	5	
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	3				WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	3	
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	9%				PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	9%	
			GROSS DEATH RATE PERMIL	14				GROSS DEATH RATE PERMIL	14	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM	Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	85,71		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	85,71		
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	365		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	365		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	30		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	30		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan	12 bulan		

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	41,760,000,000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	41,760,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pameungpeuk)		PERSENTASE BOR			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pameungpeuk)		PERSENTASE BOR		
			NET DEATH RATE PERMIL					NET DEATH RATE PERMIL		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD					WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL					PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL		
			GROSS DEATH RATE PERMIL					GROSS DEATH RATE PERMIL		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2 aplikasi		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2 aplikasi	
	PROGRAM PENINGKATAN		Persentase SDM Kesehatan yang	30 %		PROGRAM PENINGKATAN		Persentase SDM Kesehatan yang	30 %	

	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat Pelatihan Strategis			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat Pelatihan Strategis			
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86.60		
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10 dokumen		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 bulan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (LABKES)		Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	74 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (LABKES)		Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	74 %		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		

	UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan		

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UPELKES)		Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	50 %		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UPELKES)		Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	50 %		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana upaya peningkatan kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana upaya peningkatan kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	9.3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standard	9.3		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	6690		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	6690		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		

			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Pnemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Pnemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down* dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Selain itu, usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan kesehatan seperti PMI, Komisi penanggulangan AIDS, Rumah Sakit vertikal maupun swasta di Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 2.15
Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2022
Melalui RKPD Jabaronline

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	11 Kegiatan Bantuan Hibah untuk Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat	1 paket	595.705.000	
2	Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat	Dinas Kesehatan	19 Kegiatan Bantuan Hibah untuk Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat	1 Paket		
3	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan HM. Syarifudin No. 50 Kp. Pilar 1 RT 001 RW 006, Kota Bogor	Perkumpulan PEKA merupakan salah satu lembaga yang selain rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Napza, juga merupakan lembaga yang melayani dan memberikan	1 Paket		

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS. Dan kami membutuhkan dukungan operasional guna memberikan layanan yang maksimal dan menyeluruh bagi ODHA yang ada di Kota dan Kab Bogor			
4	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Gg. Iman I No.66, Kota Bandung	Mencegah Terjadinya Penyebaran HIV dan AIDS	1 Paket		
5	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan Dr. Ir. Sukarno no. 1 Kota Bandung, Kota Bandung	Penanggulangan HIV AIDS KPA Provinsi Jawa Barat	1 Paket		
6	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan, Kab. Kuningan	Epidemi HIV/AIDS di Wilayah Kabupaten Kuningan terus meningkat menjadi peringkat ke-20 di Propinsi Jawa Barat, Terbatasnya sarana dan prasarana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kuningan dalam menjalankan peran dan fungsinya yang mengakibatkan KPA Kabupaten Kuningan belum berfungsi secara optimal selaku Lembaga Non Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi	1 Paket		

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			permasalahan HIV/AIDS			

Sebagai tindak lanjut Musrenbang wilayah maupun Musrenbang Provinsi, maka Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan bantuan keuangan kepada Provinsi. Berikut usulan Kabupaten/Kota yang masuk melalui sistem RKPD Jabaronline yang terkait dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.16
Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
1	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Margonda Raya No. 54 Dinas Kesehatan Kota Depok, Kota Depok	94.348.800.000	Kota Depok
2	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi	95.829.168.960	Kota Bekasi
3	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jalan Kesehatan Nomor 77 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka, Kab. Majalengka	19.000.000.000	Kab. Majalengka
4	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD LINGGAJATI	30.000.000.000	Kab Kuningan
5	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Garut, Kab. Garut	26.308.800.000	Kab Garut
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD 45 KUNINGAN	1.147.538.750	Kab Kuningan
7	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab Bogor	1.147.538.750	Kab Bogor
8	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan - Jl. Aruji Kartawinata No.21, Kuningan, Kec.	15.422.400.000	Kab Kuningan

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
		Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511, Kab. Kuningan		
9	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD LINGGAJATI	24.804.000.000	Kab Sukabumi
110	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Jl. Mt. Haryono. No.9, Kab. Indramayu	54.432.000.000	Kab Indramayu
111	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Non Rujukan Regional Cibingbin, Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan	12.000.000.000	Kab Kuningan
112	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab Karawang	18.293.688.000	Kab Karawang
113	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jl. Letjen Suprpto No. 103, Kab. Subang	27.216.000.000	Kab Subang
114	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Veteran No 60 Purwakarta, Kab. Purwakarta	27.419.938.560	Kab Purwakarta
115	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jl. W.R. Supratman No.73, Kota Bandung	112.024.866.240	Kota Bandung
116	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jl. Pahlawan No.25, Muktisari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat 46343, Kota Banjar	15.000.000.000	Kota Banjar
117	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kota Cimahi, Kota Cimahi	15.000.000.000	Kota Cimahi
118	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	13.789.440.000	Kab Bandung Barat
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	500.965.000	Badan Pengelolaan Keuangan

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
				dan Aset Daerah
220	Peningkatan Puskesmas	Kecamatan Ciamis, Kab. Ciamis	35.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
221	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Ciamis, Kab. Ciamis	20.923.660.800	Dinas Kesehatan
222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jalan Veteran No 60 Purwakarta, Kab. Purwakarta	257.250.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
223	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	kabupaten majalengka, Kab. Majalengka	14.515.200.000	Dinas Kesehatan
224	Peningkatan Puskesmas	Jalan Raya Plered Sindangsari Kecamatan Plered Purwakarta, Kab. Purwakarta	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
225	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jalan Raya Sindangsari Kecamatan Plered Purwakarta, Kab. Purwakarta	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
226	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Kiarapedes Purwakarta, Kab. Purwakarta	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
227	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya	22.376.450.880	Dinas Kesehatan Kab Tasik
228	Peningkatan Puskesmas	Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya	22.376.450.880	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kec. Cikatomas, Kec. Salopa, Kec. Jatiwaras, Kec. Jamanis, Kec. Sukaresik, Kec. Sukahening, Kec. Puspahiang, Kec. Ciawi, Kec. Cikatomas, Kec. Culamega, Kec. Cigalontang, Kec. Bojongasih, Kab. Tasikmalaya	524.475.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
330	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Puskesmas Cilengkrang, Cinunuk, dan Santosa, Kab. Bandung	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
331	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	62 puskesmas, 70 tempat kerja, 130 desa, Kab. Bandung	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
332	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Wilayah Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	37.987.548.480	Dinas Kesehatan
333	Peningkatan Puskesmas	Kec.Pagerageung, Kab. Tasikmalaya	2.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
334	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Cicalengka, Kab. Bandung	13.855.693.212	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
335	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Kota Cirebon	19.459.077.120	Dinas Kesehatan
336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Kota Cirebon	1.912.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
37	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Bekasi, Kab. Bekasi	137.325.404.160	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
38	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	40.286.030.400	Dinas Kesehatan
39	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Surya Kencana No. 45 Kelurahan Selabatu, Kota Sukabumi	7.783.957.440	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
40	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	17.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
41	#BK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Sukabumi (Daera Intervensi Stunting), Kab. Sukabumi	1.640.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Kapten Jamhur No.34, Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46321, Kota Banjar	6.713.280.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
43	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kota Bandung	25.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
44	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Sunan Muria No 6 Komplek Perkantoran di Sumber Kab Cirebon, Kab. Cirebon	62.707.478.400	Dinas Kesehatan
45	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jln. Kutamaya No 21 Kel Kota Kulon Kec Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20.063.272.320	Dinas Kesehatan

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
46	#BK Peningkatan Puskesmas	Jln Rd Umar Wirahadikusumah Km 18 Desa Situmekar Kec Cisu, Kab. Sumedang		Dinas Kesehatan
47	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jln. Kutamaya No 21 Kelurahan Kota Kulon Kec Sumedang Utara, Kab. Sumedang	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
48	#BK Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Jl. Dr. Sumeru No.120 Bogor, Kota Bogor	255.259.279.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
49	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Kesehatan Bogor, Kota Bogor	36.288.000.000	Dinas Kesehatan
50	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	20.861.517.600	Dinas Kesehatan
51	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak Di Puskesmas, Kab. Pangandaran	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
52	#BK Peningkatan Puskesmas	Peningkatan Gedung Puskesmas di Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cibingbin, Kab. Kuningan	3.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
53	#BK Peningkatan Puskesmas	Pengadaan Instalasi Gas Medis Oksigen dan Vacuum di puskesmas, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
54	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Pasawahan,	500.000.0000	Badan Pengelolaan Keuangan

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
		Cigandamekar dan Lebakwangi, Kab. Kuningan		dan Aset Daerah
55	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Jadikarya Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
56	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Selasari, Kecamatan parigi, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
57	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
58	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Insfrastruktur Puskesmas Cijulang, Kab. Pangandaran	1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
59	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Ruang Puskesmas Langkaplancar, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
60	#BK Peningkatan Puskesmas	Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem, Kab. Subang	2.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
61	#BK Peningkatan Puskesmas	Desa Jatireja Kecamatan Comprong, Kab. Subang	2.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
62	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Prof. Moch Yamien No. 8 (Kantor Dinas Kesehatan), Kab. Cianjur	35.081.424.000	Dinas Kesehatan

NNo	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
63	#BK Peningkatan Puskesmas	Cisayong, Kab. Tasikmalaya	2.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
64	#BK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67 Puskesmas di Kabupaten Garut, Kab. Garut	1.410.380.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman

intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient* yang efektif bagi balita, anak usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyarakat madani, *perguruan* tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.

3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan *real time surveilans* dan pengendalian vektor; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan

perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan kesehatan (*Health in All Policies*).

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re- distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; serta pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;
- d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;
- e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk *big data* untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator kinerja). Adapun tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Pada Renstra awal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Dinas Kesehatan telah merumuskan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu "Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat" dengan 13 indikator sebagai berikut :

1. Ratio kematian ibu
2. Ratio kematian bayi
3. Prevalensi stunting
4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)
5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60%
6. Persentase keberhasilan pengobatan TB
7. Prevalensi hipertensi
8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan
9. Persentase puskesmas yang terakreditasi
10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat
11. Persentase rumah sakit terakreditasi
12. Persentase ketersediaan obat esensial
13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, yaitu: "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Rasio kematian Ibu;
2. Ratio kematian bayi
3. Prevalensi stunting
4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)
5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60%

6. Persentase keberhasilan pengobatan TB
7. Prevalensi hipertensi
8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan
9. Persentase puskesmas yang terakreditasi
10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat
11. Persentase rumah sakit terakreditasi
12. Persentase ketersediaan obat esensial
13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage

Namun, seiring dengan adanya perubahan di dalam kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan dan dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 dan 2021 serta disesuaikan dengan kewenangan dan tupoksi, Dinas Kesehatan merumuskan kembali tujuan jangka menengah yang akan dikawal sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh”

Dengan sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing
2. Menurunnya kasus Stunting di Provinsi Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector.

Ketercapaian Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ini akan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh system Kesehatan daerah yang Tangguh		AHH	72,85	73,04	73,06	73,09	73,11

		1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/Kota	N/A	66,36	67,63	68,92	70,58
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD	N/A	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26-83,75
			Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	2	2	3	3	4
		2. Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor	Prevalensi stunting	27,2%	25,2%	23,2%	21,2%	19,2%

Definisi operasional dari setiap IKU Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/kota	Persentase pelayanan SPM Kesehatan yang dilakukan di puskesmas	Capaian indikator SPM Kesehatan di puskesmas di 27 kab/kota dibagi jumlah SPM dikali 100	Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	IKM = total nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi x nilai penimbang	UPTD/BPS
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna	Rumah sakit milik provinsi yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna sebagai pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit	15 bab yang disurvei mendapatkan minimal nilai 80%	RS milik Provinsi
Prevalensi Stunting	Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD.	Jumlah balita pendek/jumlah balita yang diukur Panjang atau tinggi badan dikali 100	BPS

Perubahan tujuan, sasaran, dan indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka mendukung sasaran dan indikator pembangunan Kesehatan daerah dimana akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

yang berdaya saing diharapkan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya milik pemerintah dapat menampilkan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang selama ini sebagian besar masih dipandang berada di bawah performa fasilitas kesehatan milik swasta atau perorangan. Khusus bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi didorong untuk mencapai strata akreditasi tertinggi yaitu akreditasi paripurna sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, UPTD yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dapat menerapkan manajemen pengelolaan keuangan yang lebih mandiri melalui BLUD.

Penyesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan langkah mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Reformasi Sistem Kesehatan Daerah yang mengarahkan program kepada penguatan upaya kesehatan melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diantaranya pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit termasuk penyediaan pusat isolasi COVID-19; peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% *Universal Health Coverage* (UHC) melalui pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin; serta penguatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M, dan yang penting lainnya adalah penyediaan sumberdaya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar.

Berikut sandingan tujuan, sasaran, dan indikator Renstra dan Renstra Perubahan :

Isi	Lama	Perubahan
Tujuan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio kematian ibu 2. Ratio kematian bayi 3. Prevalensi stunting 4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) 5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60% 6. Persentase keberhasilan pengobatan TB 	Angka Harapan Hidup

Isi	Lama	Perubahan
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Prevalensi hipertensi 8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan 9. Persentase puskesmas yang terakreditasi 10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat 11. Persentase rumah sakit terakreditasi 12. Persentase ketersediaan obat esensial 13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage 	
Sasaran	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing 2. Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector
Indikator sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Kematian Ibu; 2. ratio kematian bayi 3. prevalensi stunting 4. persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) 5. persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60% 6. persentase keberhasilan pengobatan TB 7. prevalensi hipertensi 8. persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan 9. persentase puskesmas yang terakreditasi 10. persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat 11. persentase rumah sakit terakreditasi 12. persentase ketersediaan obat esensial 13. persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan SPM di kab/kota 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD 3. Jumlah Rumah Sakit Provinsi yang Terakreditasi Paripurna 4. Prevalensi Stunting

Selanjutnya rangkaian prioritas pembangunan bidang kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 akan diterjemahkan ke dalam arahan program-program Dinas Kesehatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh bidang dan UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat arahan program prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan program dan kegiatan, yaitu melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui :

1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tatakelola kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik;
3. Pemenuhan kebutuhan rumah sakit termasuk penyediaan pusat isolasi Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan;
4. Peningkatan kompetensi, ketersediaan, dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;
5. Peningkatan penggunaan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu di berbagai tingkat sistem kesehatan baik secara teratur maupun dalam keadaan darurat;
6. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin, dan teknologi;
7. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100 persen *Universal Health Coverage* (UHC)
8. Optimalisasi strategi promotif dan preventif seperti digitalisasi 3T dan 5 M.

Untuk menterjemahkan lebih lanjut arahan program prioritas di atas telah dirumuskan indikasi prioritas kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan dalam merumuskan kegiatan dan sub kegiatan untuk 2 (dua) tahun ke depan, yaitu :

1. Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan lembaga non pemerintah;
2. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pekerja tertentu yang belum memiliki BPJS kesehatan;
3. Penyediaan produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan;
4. Pembangunan dan peningkatan Puskesmas dan Rumah Sakit;
5. Pemenuhan sarana prasarana, SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, dan bahan habis pakai, serta akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit;
6. Pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan;
7. Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil;

8. Integrasi sistem kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
9. Penguatan promosi kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
10. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, melalui pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi, sistem informasi manajemen 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas);
11. Penyediaan vaksin COVID-19; pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi hasil vaksinasi dimana pelaksanaannya akan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta melibatkan pemangku kepentingan agar efektif dan efisien;
12. Sosialisasi berkelanjutan mengenai keamanan vaksin;
13. Pengendalian penularan dan peningkatan kasus sekaligus pengendalian pencemaran limbah medis akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 ;
14. Kajian pembangunan rumah sakit rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan, serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19;
15. Pusat isolasi mandiri COVID-19 di tingkat desa/kelurahan
16. Penguatan regulasi Kesehatan

Selain arahan program prioritas dan kegiatan prioritas di atas, ada beberapa indikasi program dan kegiatan pada wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan, dan wilayah perbatasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, diantaranya :

- a. Wilayah Pengembangan : penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Pusat-Pusat Kegiatan :
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKN yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe A;
 - Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKW yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe B; dan
 - Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKL yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe C dan pembangunan puskesmas PONEB
- c. Wilayah Perbatasan :
 - Kerjasama dalam pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten

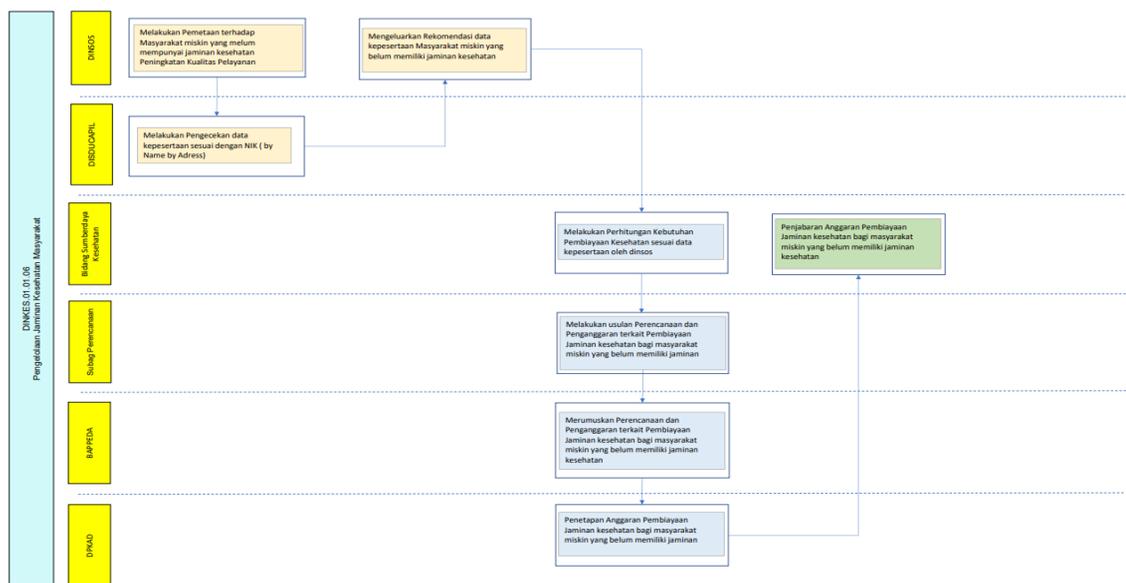
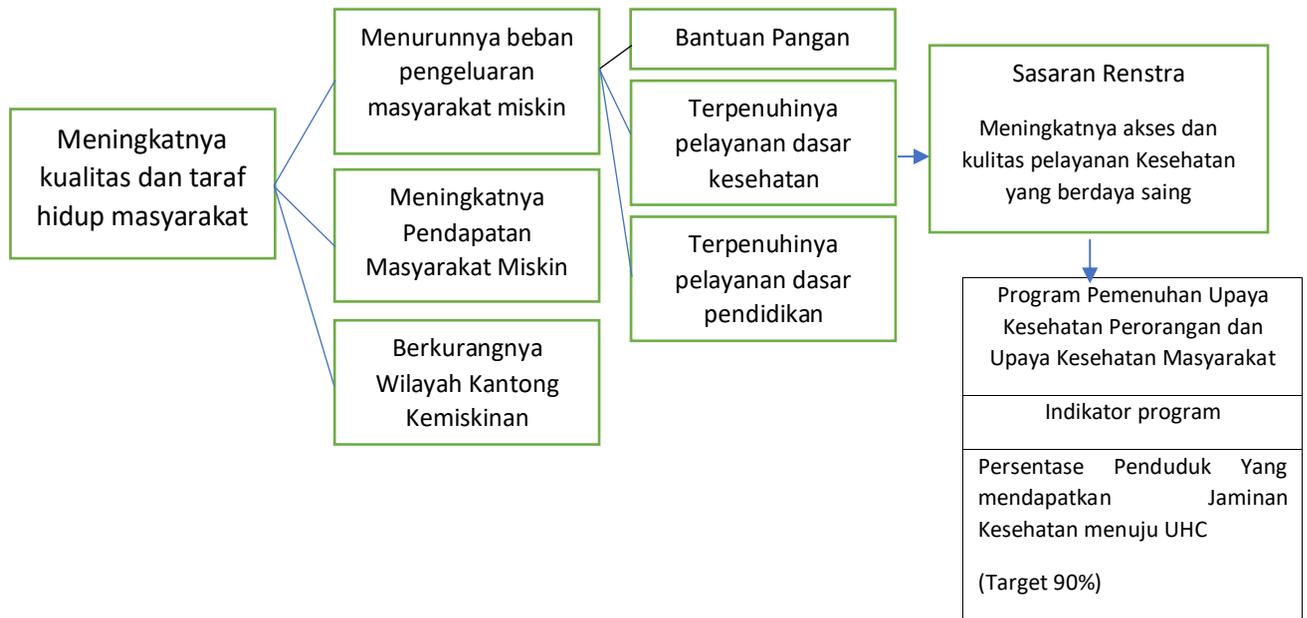
Dalam merencanakan program dan kegiatan urusan kesehatan, sesuai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi yaitu meningkatkan derajat kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan daerah yang tangguh, maka perlu dilakukan pula identifikasi program dan kegiatan yang dapat mengakselerasi terwujudnya sistem reformasi kesehatan daerah yang tangguh melalui :

- a. Upaya kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Pembangunan dan pengembangan rumah sakit dan puskesmas
 - Penyediaan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar
 - Pemerataan fasilitas kesehatan tingkat rujukan
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui penguatan sarana, prasarana, dan SDM terlatih dalam persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
 - Perluasan intervensi spesifik dan penguatan intervensi sensitif yang terintegrasi
 - Penguatan upaya konvergensi multisector/jejaring kemitraan
 - Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
 - Penguatan surveilans yang terintegrasi dan real-time
 - Adaptasi kebiasaan baru penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Jawa Barat
 - Pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas di Jawa Barat termasuk pengembangan fasilitas kesehatan di Kawasan metropolitan rebana dan wilayah perbatasan.
 - Pengelolaan BLUD yang baik
- b. Pembiayaan kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan
 - Memperluas akses dan jejaring pembiayaan kesehatan
- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Peningkatan kompetensi, ketersediaan, dan distribusi sumberdaya manusia kesehatan yang ideal melalui pelatihan, pembiayaan pendidikan, dan insentif tenaga kesehatan
 - Penguatan Upelkes sebagai "*Corporate University*"
- d. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Penyediaan produk-produk farmasi yang penting dan aman
 - Penyediaan vaksin yang memadai
 - Penyediaan teknologi kesehatan untuk pelayanan kesehatan
 - Penguatan penatalaksanaan sediaan farmasi
 - Pengadaan alat kesehatan
 - Pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman berbahaya

- e. Pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Penguatan integrasi sistem kesehatan antara pusat dan daerah
 - Pengadaan Regulasi manajemen system informasi kesehatan provinsi
 - Review regulasi dan kebijakan kesehatan
- f. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
 - Penguatan/pengembangan jejaring kolaborasi dan kerjasama dalam upaya promotif dan preventif
 - Pengembangan media dan digitalisasi promosi kesehatan
 - Penguatan pengembangan dan penelitian kesehatan

Berdasarkan arahan program dan kegiatan prioritas serta memperhatikan arahan pada RTRW dan wilayah perbatasan di atas, maka dirumuskan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Selain itu, indikator program mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga mengutamakan penggunaan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) output dan outcome sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Di samping program prioritas di atas, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga ikut serta di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Melalui Program pembiayaan Kesehatan yang menasar pada penduduk miskin di Kabupaten/Kota, diharapkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan Kesehatan dapat terwujud secara optimal. Dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Lain yang terkait terutama bersama Dinas Sosial terkait data penduduk miskin dan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil dalam hal pengadaan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu syarat pemanfaatan pelayanan BPJS. Berikut bagan alur yang menggambarkan keterlibatan Dinas Kesehatan terhadap pencapaian indicator kinerja daerah terkait kemiskinan dan *cross cutting* program penanggulangan kemiskinan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.



Berikut anggaran yang dialokasikan untuk program kemiskinan tahun 2022 :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS SUB KEGIATAN	2022	2022 Perubahan	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
						ANGGARAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5		6	7	9	12
	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan JKN 2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencapaian UHC 3. Percepatan Klaim dan Dispute Klaim Covid-19 4. Pelaksanaan Penyusunan PHA (p) Provinsi Jawa Barat 5. Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan Puskesmas Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	353,361,219,960	429,708,696,040	APBD & DBHCHT	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	7,000,000,000	7,000,000,000	APBD	RSUD PAMEUNGPEUK

				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	7,543,900,000	2,500,000,000	APBD	RSUD JAMPANGKULON
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	3,500,000,000	3,500,000,000	APBD	RS JIWA
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	500,000,000	500,000,000	APBD	RS PARU
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	10,000,000,000	33,103,309,772	APBD	RSUD AL IHSAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	100,000,000	350,000,000	APBD	RSKK
				Bantuan Keuangan Jaminan Kesehatan untuk 27 Kabupaten/Kota	Pembiayaan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin	1,029,764,534,400	1,029,764,534,400	Bantuan Keuangan	Kab/Kota
						1,411,769,654,360	1,506,426,540,212		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut :

I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran program adalah

- Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya kualitas sumberdaya pembiayaan dan jaminan Kesehatan
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Kesehatan di Jawa Barat
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan berkualitas di kabupaten/kota
- Meningkatnya fasilitas Kesehatan kabupaten/kota yang memenuhi standar mutu pelayanan
- Terlaksananya pelayanan layad rawat di kabupaten/kota
- Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Kesehatan tradisional di kabupaten/kota
- Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di rumah sakit sesuai standar
- Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan lain sesuai standar
- Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit
- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan pada masyarakat di RS Provinsi
- Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pelatihan bidang Kesehatan
- Meningkatnya mutu/kualitas pelayanan di RSUD

Adapun kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kapasitas fasilitas Kesehatan kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan
 - Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit
 - Meningkatnya kualitas pelayanan medik dan penunjang di RS Provinsi
 - Meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan di RS Provinsi
 - Terfasilitasinya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kesehatan lingkungan
 - Terfasilitasinya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kesehatan kerja dan olahraga

- Terlayaninya pasien tidak mampu yang memberikan pelayanan Kesehatan di RS Provinsi dengan Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan usia produktif;
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut;
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan;
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan haji;
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga;
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan ODMK;
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA;
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat KLB dan/atau berpotensi KLB;
- 12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan surveilans Kesehatan;
- 13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran terbinanya pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan;
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
- 15) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pendampingan fasilitas pelayanan Kesehatan;

- 16) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
 - 17) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan sasaran tersedianya dan terkelolanya Public Safety Center (PSC) 119 yang terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT);
 - 18) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota;
 - 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat;
 - 20) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan rujukan dan rujukan balik;
 - 21) Pengelolaan Penelitian Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan penelitian Kesehatan;
 - 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus, dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan khusus;
 - 23) Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan sasaran tersedianya operasional pelayanan rumah sakit;
 - 24) Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana, dengan sasaran terlaksananya penilaian/appraisal sarana prasarana dan alat Kesehatan pasca bencana;
 - 25) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan;
 - 26) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional, dengan sasaran terlaksananya pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional;
 - 27) Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota;
 - 28) Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas, dengan sasaran verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi puskesmas.
- b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
- 1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan sasaran terlaksananya distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya;

- 2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center, dengan sasaran terlaksananya pengembangan unit pemeliharaan fasilitas Kesehatan regional/regional maintenance center;
- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, dengan sasaran tersedianya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat Kesehatan/peralatan laboratorium Kesehatan;
- 4) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan sasaran tersedianya prasarana fasilitas layanan Kesehatan;
- 5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan sasaran tersedianya alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan;
- 6) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan sasaran terlaksananya pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya;
- 7) Pengembangan Rumah Sakit, dengan sasaran tersedianya rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit;
- 8) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, dengan sasaran tersedianya sarana di fasilitas layanan Kesehatan;
- 9) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), dengan sasaran tersedianya bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk, dan habis pakai lainnya);
- 10) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit, dengan sasaran tersedianya barang penunjang operasional rumah sakit;
- 11) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dengan sasaran terlaksananya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
- 12) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan sasaran terlaksananya pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya;
- 13) Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, dengan sasaran terlaksananya pengembangan rumah dinas tenaga Kesehatan;
- 14) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
- 15) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- 16) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 17) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- 18) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 19) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 20) Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

21) Pemeliharaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 2) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
- 3) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

II. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**, dengan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, dengan sub kegiatan:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

III. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**, dengan sasaran program adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:

a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dengan sub kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik

b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan sub kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 7) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- c. Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 6) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 7) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Mebel
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator, target kinerja, dan kerangka pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tersedia pada tabel terlampir.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																							
Provinsi Jawa Barat																							
Tahun 2022																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT																							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										79.232.920.986	93.463.438.187			*****				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										47.332.920.986	61.563.438.187			51.159.900.000				
1	2	1	1,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										100.000.000	100.000.000			3.529.900.000				
1	2	1	1,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	100	100					100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	2.900.700.000		

1	2	1	1,0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk		Persentase Unit Kerja yang mendapat kan pelayanan administra si keuangan dan umum RS Pameungp euk	Kab. Garut, Pameungp euk, Sirnabakti	100	100					100 per sen	0	0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	314.600.00 0		
1	2	1	1,0 6	9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk		Persentase Unit Kerja yang mendapat kan pelayanan administra si keuangan dan umum RS Pameungp euk	Kab. Garut, Pameungp euk, Sirnabakti	100	100					100 per sen	100.000.00 0	100.000.00 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	314.600.00 0		
1	2	1	1,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0					3.630.000.0 00	
1	2	1	1,0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk				100	100						0	0			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	2.310.000.0 00	

1	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk				100	100					0	0			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	1.320.000.000	
1	2	1	1,1		Peningkatan Pelayanan BLUD										47.232.920.986	61.463.438.187					44.000.000.000		
1	2	1	1,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk			Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	100	100					47.232.920.986	61.463.438.187	Pendapatan dari BLUD		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum RS Pameungpeuk	100	44.000.000.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										13.100.000.000	13.100.000.000					44.770.990.000		
1	2	2	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										5.500.000.000	5.500.000.000					36.300.000.000		
1	2	2	1,01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PERSENTASE BOR RS Pameungpeuk			Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	75	75					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE BOR RS Pameungpeuk	75	0	
1	2	2	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PERSENTASE BOR RS Pameungpeuk			Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	75	75					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE BOR RS Pameungpeuk	75	27.500.000.000	

																			DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan													
1	2	2	1,0 1	1 4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	PERSENTASE BORRS Pameungpeuk				75	75							5.500.000,00	5.500.000,00			PERSENTASE BORRS Pameungpeuk	75		8.800.000,00							
1	2	2	1,0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											7.600.000,00	7.600.000,00								8.470.990,00							
1	2	2	1,0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Bor UPTD RSUD PAMEUNGPEUK				Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	75	75						600.000,00	600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bor UPTD RSUD PAMEUNGPEUK	75		627.990,00							
1	2	2	1,0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Bor UPTD RSUD PAMEUNGPEUK				Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	75	75					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bor UPTD RSUD PAMEUNGPEUK	75		143.000,00								
1	2	2	1,0 2	1 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Bor UPTD RSUD PAMEUNGPEUK					75	75					7.000.000,00	7.000.000,00				75		7.700.000,00								
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											18.800.000,000	18.800.000,000								22.289.300,000							
1	2	3	1,0 1		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi											18.800.000,000	18.800.000,000								22.000.000,000							
1	2	3	1,0 1	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis UPTD RSUD PAMEUNGPEUK		Jumlah Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19		Kab. Garut, Pameungpeuk, Sirnabakti	85,71	85,71	1 Tahun	1 Tahun				18.800.000,000	18.800.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis UPTD RSUD PAMEUNGPEUK	85,71		22.000.000,000							

1	2	3	1,0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										0	0				289.300.00 0		
1	2	3	1,0 2	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis UPTD RSUD PAMEUNGP EUK														85,7 1	289.300.00 0
TOTAL														79.232.920. 986	93.463.438. 187				##### ##		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																							
Provinsi Jawa Barat																							
Tahun 2022																							
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																							
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT																							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														40.276.000.000	40.276.000.000			80.017.500.000
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														9.257.788.000	10.343.274.847			13.287.500.000
1	2	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														100.000.000	100.000.000			110.000.000
1	2	1	1,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar				5 Dokumen			100.000.000	100.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.000.000		
1	2	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														88.596.000	47.946.000			275.000.000
1	2	1	1,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar				12 Dokumen			88.596.000	47.946.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			275.000.000		
1	2	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														81.500.000	81.500.000			550.000.000
1	2	1	1,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar				23 Orang			81.500.000	81.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			550.000.000		
1	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														1.592.695.000	1.969.510.650			3.052.500.000

1	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar					18 Paket			886.000.000	1.020.320.950	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.320.000.000
1	2	1	1,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar					3 Paket			117.225.000	148.863.700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				192.500.000
1	2	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar					1 Paket			130.000.000	194.406.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				220.000.000
1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar					12 Laporan			459.470.000	605.920.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.320.000.000
1	2	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					1.100.000.000
1	2	1	1,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar								0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.100.000.000
1	2	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4.894.997.000	4.833.904.240					5.500.000.000
1	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Bandun g, Rancaek ek, Nanjung Mekar					12 Laporan			894.997.000	894.997.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.100.000.000

1	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar		24 Orang	12 Laporan		4.000.000.000	3.938.907.240	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.400.000.000
1	2	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.500.000.000	3.310.413.957		2.700.000.000	
1	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			16 Unit		500.000.000	404.240.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000
1	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar		1 Pekerja	1 Unit		1.000.000.000	1.472.844.827	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.100.000.000
1	2	1	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar		1 Pekerja	147 Unit		1.000.000.000	1.433.329.130	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.100.000.000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							15.917.712.000	15.778.276.913		32.850.000.000	
1	2	2	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							4.518.000.000	4.668.934.500		6.600.000.000	
1	2	2	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			113 Unit		4.000.000.000	4.054.600.000	DBH CHT		5.500.000.000

1	2	2	1,01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			1 Pekerja	437 Unit			518.000.000	614.334.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.100.000.000
1	2	2	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								11.154.712.000	10.910.388.813					25.150.000.000
1	2	2	1,02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			1 Pekerja	5 Dokumen			900.000.000	824.803.989	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.200.000.000
1	2	2	1,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			1 Kegiatan	3 Dokumen			790.000.000	790.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.300.000.000
1	2	2	1,02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar				1 Dokumen			100.000.000	100.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.650.000.000
1	2	2	1,02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			300 Tabung	18 Dokumen			9.364.712.000	9.195.584.824	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.000.000.000
1	2	2	1,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								245.000.000	198.953.600					1.100.000.000
1	2	2	1,03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			2 Set	6 Dokumen			245.000.000	198.953.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.100.000.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								15.100.500.000	14.154.48.240					33.880.000.000
1	2	3	1,01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								15.000.000.000	13.886.48.240					33.000.000.000

1	2	3	1,01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar			12 Bulan	155 Orang			15.000.000.000	13.886.448.240	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.000.000.000
1	2	3	1,02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										100.500.000	268.000.000				880.000.000	
1	2	3	1,02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan		Kab. Bandung, Rancaek, Nanjung Mekar				62 Orang			100.500.000	268.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			880.000.000
TOTAL															40.276.000.000	40.276.000.000				80.017.500.000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																								
Provinsi Jawa Barat																								
Tahun 2022																								
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																								
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT																								
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah							
1																								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										79.641.249.400	91.876.199.400				170.600.000.000				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										43.477.552.971	55.712.502.971				86.500.000.000				

1	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										500.000.000	500.000.000					13.250.000.000						
1	2	1	1,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa										100.000.000	75.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				350.000.000
1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa										400.000.000	425.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				2.000.000.000
1	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										10.505.000.000	10.505.000.000					15.000.000.000						
1	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa										10.505.000.000	10.505.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				15.000.000.000
1	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	0					7.250.000.000						
1	2	1	1,09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		kebutuhan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit						12 bulan	12 bulan						0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				6.000.000.000
1	2	1	1,1	Peningkatan Pelayanan BLUD										32.472.552.971	44.707.502.971					50.000.000.000						
1	2	1	1,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Belanja operasional RS Jiwa			Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa			12 bulan	12 bulan						32.472.552.971	44.707.502.971	Pendapat an dari BLUD				50.000.000.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										32.467.800.000	32.467.800.000					66.600.000.000						
1	2	2	1,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										28.767.800.000	28.767.800.000					49.000.000.000						
1	2	2	1,01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Terbangunnya gedung pelayanan Rawat Jalan Intensif (RJI)			Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa			1 Gedung	1 Gedung						28.767.800.000	28.767.800.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				25.000.000.000

																		DBH CHT					
																			PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				
																			DAK Fisik - Bidang Kesehata n - Reguler - Pelayana n Kesehata n Rujukan				
1	2	2	1, 01	1 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa							0	0					15.000.00 0.000
1	2	2	1, 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													3.500.000. 000	3.500.00 0.000				14.600.00 0.000
1	2	2	1, 02	1 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa							3.500.000. 000	3.500.00 0.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				9.000.000. 000
1	2	2	1, 03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi													200.000.0 00	200.000. 000				2.000.000. 000
1	2	2	1, 03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informati Kesehatan dan Jaringan Internet					Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa							200.000.0 00	200.000. 000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				2.000.000. 000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													3.695.896. 429	3.695.89 6.429				17.500.00 0.000
1	2	3	1, 01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi													3.395.896. 429	3.395.89 6.429				5.500.000. 000
1	2	3	1, 01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah tenaga non PNS medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan			Kab. Bandun g Barat, Cisarua, Jambudi pa			12 bulan	12 bulan			3.395.896. 429	3.395.89 6.429	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)				5.500.000. 000
1	2	3	1, 02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													300.000.0 00	300.000. 000				12.000.00 0.000

1	2	3	1,02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa							156.000.000	156.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.000.000.000					
1	2	3	1,02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa							144.000.000	144.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000.000					
TOTAL																79.641.249.400	91.876.199.400					170.600.000.000						
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																												
Provinsi Jawa Barat																												
Tahun 2022																												
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																												
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI																												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target													
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		97.543.900.000	100.018.474.000				155.040.000.000

1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										48.000.000.000	48.000.000.000					65.390.000.000	
1	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										500.000.000	857.700.000					1.870.000.000	
1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				813 laporan			500.000.000	857.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.870.000.000
1	2	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					4.450.000.000	
1	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel				Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung						0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.650.000.000	
1	2	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7.500.000.000	7.142.300.000					10.670.000.000	
1	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				4 laporan			2.013.279.000	1.655.579.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.420.000.000
1	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				2 Laporan			5.486.721.000	5.486.721.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.250.000.000
1	2	1	1,1		Peningkatan Pelayanan BLUD										40.000.000.000	40.000.000.000					48.400.000.000	
1	2	1	1,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				1 Unit Kerja			40.000.000.000	40.000.000.000	Pendapatan dari BLUD				48.400.000.000

						Jumlah Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					12 Bulan									
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						18.043.90 0.000	20.518.4 74.000					61.800.00 0.000		
1	2	2	1,01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						10.500.00 0.000	18.018.4 74.000					45.300.00 0.000		
1	2	2	1,01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pembayaran sisa pembangunan Gedung Pemeriksaan Lobratorium dan Radiologi Biosafety Lavel II		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				1 Dokumen			0	2.474.57 4.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
						Jumlah Pembayaran sisa pembangunan Gedung Salasar dan Landscape				1 Dokumen										
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Dokumen										
1	2	2	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				86 Unit			5.500.000. 000	10.543.9 00.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.600.00 0.000
														DBH CHT						

1	2	2	1,01	1	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				2369 Unit			500.000.000	500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				6.600.000.000
1	2	2	1,01	6	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				566470 Unit			4.500.000.000	4.500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				16.500.000.000
1	2	2	1,01	7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung							0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				600.000.000
1	2	2	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											7.543.900.000	2.500.000.000					16.500.000.000
1	2	2	1,02	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				420 Dokumen			7.543.900.000	2.500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				16.500.000.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											31.500.000.000	31.500.000.000					27.850.000.000
1	2	3	1,01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi											31.400.000.000	31.400.000.000					27.500.000.000
1	2	3	1,01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				366 Orang			31.400.000.000	31.400.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				27.500.000.000
1	2	3	1,02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											100.000.000	100.000.000					350.000.000
1	2	3	1,02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan		Kab. Sukabumi, Jampangkulon, Tanjung				18 Orang			100.000.000	100.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				350.000.000

													TOTAL	97.543.90 0.000	100.018. 474.000		155.040.0 00.000
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Provinsi Jawa Barat																	
Tahun 2022																	
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	1															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1	2	1	1, 01														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

1	2	1	1,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kota Bandung, Sukajadi, Pasteur		100.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1.631.202.534	1.631.202.534		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 persen	2.483.134.940
1	2	1	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kota Bandung, Sukajadi, Pasteur		100.00 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	154.512.000	154.512.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 persen	50.437.241
1	2	1	1,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.00 persen	1 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	23.706.000	23.706.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 persen	23.706.000

1	2	1	1,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 persen	12 Laporan	2 Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	69.553.000	69.553.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 persen	680.029.500
1	2	1	1,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	2.942.000	2.942.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 persen	199.608.694
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan								
1	2	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										530.566.806.382	369.563.872.975				532.016.806.382
1	2	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	100	4 Laporan	1350 Orang/Bulan	4 Laporan	4 Laporan	530.466.806.382	369.333.969.975	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	530.466.806.382

1	2	1	1,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		100		2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	23.348.000	67.294.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	150.000.000
1	2	1	1,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		100	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	57.152.000	75.567.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	1.300.000.000
1	2	1	1,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		100	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.500.000	87.042.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	100.000.000
1	2	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2.612.905.496	2.313.094.734				0	
1	2	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Pakaian Adat	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		100	300 Stel	300 Stel	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	0

						Persentase Ketersediaan data kinerja	Jumlah Pakaian Dinas Harian				100.00 persen	300 Stel	300 Stel					Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen			
						Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	Jumlah Pakaian Olahraga				100	300 Stel	300 Stel					Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	100			
							Jumlah Pakaian Pramuka					300 Stel	300 Stel									
1	2	1	1,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Pelayanan Adminis trasi Kepegawaian	Kota Bandun g. Cicendo , Pasir Kaliki		100	10 Orang	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan		1.657.418.496	1.657.318.496	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	0
						Persentase Ketersediaan data kinerja					100.00 persen								Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen		
						Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi					100								Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	100		
1	2	1	1,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Orang Mengikuti Diklat PIM	Terpenuhinya Pelayanan Adminis trasi Kepegawaian	Kota Bandun g. Cicendo , Pasir Kaliki		100	10 Orang	10 Orang	12 Bulan	12 Bulan		463.750.000	225.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	0
						Persentase Ketersediaan data kinerja	Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Team Building Sekretariat				100.00 persen	300 Orang	200 Orang						Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen		

						Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi												Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	100	
1	2	1	1,05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	4 Kali	4 Kali	12 Bulan	12 Bulan			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	
						Persentase Ketersediaan data kinerja	Jumlah Belanja Jasa Akomodasi			100.00 persen	10 Kali	9 Kali						Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen	
						Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	Jumlah Bulan Perjalanan Dinas			100	12 Bulan	13 Bulan			491.737.000	430.776.238		Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui website dan Sosialisasi	100	0
							Jumlah Honorarium Narasumber				60 Orang	39 Orang								
							Jumlah Makan dan Minum Rapat				1 Tahun	1 Tahun								
1	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									2.196.706.140	4.915.061.797				0	
1	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah ATK Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	4 Paket	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	672.425.140	1.987.341.451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	0

							500 Kali	156 Kali												

						Jumlah Pengadaan Refill Handsanitizer				125 Jerigen	125 Jerigen										
						Jumlah Pengadaan Tablet					8 Unit										
1	2	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Pengadaan Cetak Spanduk	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	100	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	255.167.000	255.167.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	0	
							Jumlah Pengadaan Cetak untuk Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran				1 Tahun	1 Tahun									
							Jumlah Pengadaan Kalender				300 Eksemplar	200 Eksemplar									
1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Penyediaan Jasa Akomodasi	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	100	1 Paket	4 Kali	12 Bulan	12 Bulan	1.269.114.000	2.672.553.346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	0	
							Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Kedinasan				12 Bulan	12 Bulan									
							Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat				12 Bulan	12 Bulan									

						Jumlah Penyediaan Minuman Air Mineral/ Galon						12 Bulan	12 Bulan										
						Jumlah Perjalanan Dinas						12 Bulan	12 Bulan										
1	2	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	22.096.322.261					60.658.000.000	
1	2	1	1,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan	Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	Kota Bandun g. Cicendo , Pasir Kaliki				1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	22.096.322.261	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				60.658.000.000	
1	2	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											8.006.727.169	5.271.534.564					0	
1	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Belanja Langganan Air Bersih	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Jasa Penunjang	Kota Bandun g. Cicendo , Pasir Kaliki			100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	0
							Jumlah Belanja Langganan Listrik						12 Bulan										
							Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar / Majalh						12 Bulan				1.984.917.625	1.614.417.625					
							Jumlah Belanja Langganan Telepon						12 Bulan										
							Jumlah Belanja Ucapan Karangang Bunga						20 buah										
							Jumlah Iuran Sampah						12 Bulan										
							Jumlah Kegiatan Media dan Komunikasi Publik						11 Paket										

						Jumlah Tayang ILM di Bioskop tentang Program Prioritas																							
						Jumlah Tayang ILM di KRL tentang Program Prioritas / Kegiatan Pimpinan																							
						Jumlah Tayang ILM di Media Online dan Billboard tentang Program Prioritas/ Kegiatan Pimpinan																							
						Jumlah Tayang ILM di Media Sosial tentang Program Prioritas/ Kegiatan Pimpinan																							
						Jumlah Video Animasi Program Prioritas																							
						Jumlah Video Visual Program Prioritas/ Kegiatan Pimpinan																							
1	2	1	1,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Belanja Jasa Instalasi Listrik untuk Sarana dan Prasarana Penunjang Gudang Vaksin	Terpenuhi Waktu Pelayanan Jasa Penunjang	Kota Bandung g. Cicendo, Pasir Kaliki		100		1 Pekerja	12 Bulan	12 Bulan									Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100				0
							Belanja Jasa Keamanan untuk Gudang Vaksin						3 Orang																

						Belanja Jasa Kebersihan untuk Gudang Vaksin						3 Orang								
						Belanja Jasa Operator untuk Gudang Vaksin						3 Orang								
						Belanja Jasa Penyambungan Listrik Baru untuk Sarana dan Prasarana Penunjang Gudang Vaksin						1 Pekerja an								
						Honorarium Jasa Penilai Barang Milik Negara					1 Pekerja an	24 Orang								
						Sewa Lapangan Olahraga						10 Bulan								
1	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Terpenuhi Waktu Pelayanan Jasa Penunjang	Kota Bandungan, Pasir Kaliki	100	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	3.021.809.544	3.021.809.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	0
1	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2.516.285.775	2.850.083.485			144.408.000
1	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Pasir Kaliki	100.00 persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	484.059.000	514.068.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	0

1	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Fisik Bangunan	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100.00 persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	840.000.000	840.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	144.408.000
							Jumlah Bulan pemeliharaan Gudang Obat				12 Bulan	12 Bulan								
							Jumlah Bulan Pemeliharaan kamar Dingin Vaksin				12 Bulan	12 Bulan								
							Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pest Kontrol				12 Bulan	12 Bulan								
1	2	1	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Kantor	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100.00 persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.192.226.775	1.496.015.485	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	0
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										450.342.134.061	476.991.112.246			442.640.373.693	
1	2	2	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										51.288.907.836	40.051.260.261			33.038.843.000	
1	2	2	1,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Jumlah Alat Pengukur Suhu yang telah dilakukan Kalibrasi	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	92.00 persen	10 Unit	10 Unit	3 Dokumen	3 Dokumen	900.064.836	900.064.836	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	92.00 persen	1.150.000.000

		Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																
	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya							1 Dokumen										DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
	Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Penatalaksanaan Sediaan Farmasi							1 Dokumen	1 Dokumen									
	Jumlah Dokumen Pemusnahan Obat dan dan Perbekalan Kesehatan yang rusak dan Kadaluarsa							1 Dokumen	1 Dokumen									
	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat dan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program							3 Dokumen	3 Dokumen									
	Jumlah Kab/Kota yang Telah dilakukan Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin							27 Kab/Kota	27 Kab/Kota									
	Jumlah Kab/Kota yang telah terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat							27 Kab/Kota	27 Kab/Kota									

						Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %					25 Kab/Kota	25 Kab/Kota									
						Jumlah Modul yang telah di Maintenance sesuai kebutuhan data yang di perlukan pada Aplikasi E-Logistik					1 Aplikasi	1 Aplikasi									
						Jumlah Modul yang telah di Maintenance sesuai kebutuhan data yang di perlukan pada Aplikasi E-Mosi					1 Aplikasi	1 Aplikasi									
						Jumlah Tenaga Teknis Pendamping Program Pelaksana Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan					5 Orang	5 Orang									
1	2	2	1,01	2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		92.00 persen	9 Paket	3 Dokumen	3 Dokumen	31.888.843.000	27.729.283.425	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	92.00 persen	31.888.843.000	

1	2	2	1, 01	2	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Didistribusikan ke Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki		92.00 persen		7 Paket	3 Dokumen	3 Dokumen	18.500.000.000	11.421.912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	92.00 persen	0	

																		Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	Jumlah dokumen rencana kontijensi bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Barat	90	1 dokumen	1 dokumen											Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90
																			Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program haji	80.19 persen	27 kab/kota	27 kab/kota										Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen
																			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah kab/kota yang menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi	100.00 persen	27 kab/kota	27 kab/kota										Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen
																			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100.00 persen		19451 Orang									Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	

																			Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Jumlah petugas TGC yang melaporkan hasil pelaksanaan program haji					95.00 persen	27 kab/kota	27 kab/kota									Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen
																			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	Laporan RHA bencana alam di wilayah Jawa Barat					91.00 persen	1 dokumen	1 dokumen									Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen
																			Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar						96.00 persen											Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen
																			Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas						90.00 persen											Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen
																			Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)						85.00 persen											Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen

																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB/Covid 19	100.00 persen	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen
																		Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan SKDR	95.00 persen	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota					Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen
																		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	Jumlah Tenaga Teknis Program Honorarium yang terbayar	91.00 persen	3 Orang	3 Orang					Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen
																		Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar		96.00 persen							Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen
																		Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas		90.00 persen							Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen

																	Tradisiona l		
																	Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																	Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
																	Tradisiona l		
																	Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																	Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	

																			Tradisiona l		
																			Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																			Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
																			Tradisiona l		
																			Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																			Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	

																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan														Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen			
																		Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)															Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen		
																		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan															Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen		
																		Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar															Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen		
																		Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas															Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen		

						Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)												Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen		
						Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tersedianya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83.00 persen	27 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen		
1	2	2	1,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat				100.00 persen					209.114.920	209.114.920		Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen		209.114.920
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan				88.00 persen								Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan	88.00 persen		

																Tradisiona l	
						90										Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90
						80.19 p ersen										Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen
						100.00 persen										Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen

																		Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen										Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen											
1	2	2	1,02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.00 persen	18 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen																					
						Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layaad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat				100.00 persen						394.302.080	353.419.200		Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen																			394.302.080		
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyenggarakan Kesehatan				88.00 persen									Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyenggarakan Kesehatan	88.00 persen																					

																	Tradisiona l		
							90										Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
							80.19 p ersen										Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
							100.00 persen										Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
																	Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																	Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	

															Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan		100.00 persen							Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan		100.00 persen		
															Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)		95.00 persen							Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)		95.00 persen		
															Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan		91.00 persen							Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan		91.00 persen		
															Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar		96.00 persen							Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar		96.00 persen		
															Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas		90.00 persen							Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas		90.00 persen		

																			Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	3.) Dokumen laporan Monitoring Kewaspadaan Umum dan Pembinaan Kesehatan Kerja Pada Pelayanan Kesehatan Tradisional					88.00 persen	1 dokumen	1 dokumen													Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	88.00 persen	
																				Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	4.) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					90	1 Dokumen													Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90	
																				Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi						80.19 persen														Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen	
																				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi						100.00 persen														Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	

																	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen													Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	
																	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen											Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen			
																	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen											Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen			
																	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen											Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen			
																	Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen											Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen			

					Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)					85.00 persen							Presentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen	
					Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen Evaluasi Model Intervensi Desa Bebas TBC	Tersedianya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83.00 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen	
					Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat		Kota Bandung, Cicendo, Semua Kelurahan		100.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen			2.632.833.493	2.632.833.493	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen	2.632.833.493
					Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				88.00 persen		1 Dokumen					Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan	88.00 persen	
1	2	2	1, 02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

																Tradisiona l													
																Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Advokasi HPISP	90		1 Dokume n								Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90
																Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Koordinasi P2 Zoonosis	80.19 p ersen	1 Dokume n	1 Dokume n							Persentase Kabupaten / Kota yang melaksana kan Surveilans Gizi	80.19 p ersen	
																Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular	100.00 persen	1 Dokume n	1 Dokume n						Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen		

																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan P2 Zoonosis di tingkat Provinsi	100.00 persen	2 Laporan	2 Laporan							Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	
																		Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Penguatan GIRIJ	95.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen							Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen	
																		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Peningkatan Manajemen Program untuk Pencatatan dan Pelaporan	91.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen						Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen		
																		Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	Jumlah Dokumen Kontrak Tenaga IT Program P2 TBC	96.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen						Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen		
																		Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum	Jumlah dokumen kontrak Tenaga pendamping P2 Filariasis dan cacingan	90.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen						Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum	90.00 persen		

															yang berkualitas		
															Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen	
															Jumlah Dokumen Kontrak Tenaga Pendamping Teknis Program P2 TBC	1 Dokumen	1 Dokumen
															Jumlah Dokumen Pertemuan Advokasi Percepatan Eliminasi Malaria		1 Dokumen
															Jumlah dokumen Pertemuan Akselerasi Eliminasi Filariasis dan peningkatan pengendalian cacangan	1 Dokumen	1 Dokumen
															Jumlah Dokumen Pertemuan Kolaborasi TB DM	1 Dokumen	1 Dokumen
															Jumlah Dokumen Pertemuan Kolaborasi TB HIV	1 Dokumen	1 Dokumen
															yang berkualitas		

																												1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																			1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen									
									1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																			1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																												
								1 Dokumen	1 Dokumen																			1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																															
									1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																		
								1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																					
								1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																								
								1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																											
								1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																														
								1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																	
								1 Dokumen	1 Dokumen																																																																																																																																																																																				

								2 Dokumen	2 Dokumen									
								1 Dokumen	1 Dokumen									
									1 Dokumen									
								2 Dokumen	2 Dokumen									
									1 Dokumen									

		Jumlah Dokumen Tenaga Administrasi Tenaga Teknis Sekretaris KPA Provinsi Jawa Barat						1 Dokumen										
		Jumlah Dokumen Virtual Meeting Silantor						1 Dokumen	1 Dokumen									
		Jumlah Dokumen Workshop Sistem Informasi Malaria dalam rangka percepatan Eliminasi Provinsi							1 Dokumen									
		Jumlah Laporan Dalam Rangka Bimbingan Teknis Program P2 Kusta							18 Laporan									
		Jumlah Laporan Dalam Rangka Konsultasi Teknis Program P2 Kusta							1 Laporan									
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Monitoring P2 Zoonosis						1 Dokumen	26 Laporan									

								11 Laporan	11 Laporan											
								54 Orang	10 Laporan											
								26 Laporan	26 Laporan											
								26 Laporan	26 Laporan											
								25 Laporan	18 Laporan											
								26 Laporan	26 Laporan											
								26 Laporan	26 Laporan											

					Jumlah Laporan hasil Konsultasi Pengendalian Filariasis & Cacingan			2 Laporan	2 Laporan											
					Jumlah Laporan hasil Konsultasi Teknis P2 DBD ke Pusat			1 Laporan	1 Laporan											
					Jumlah Laporan hasil Konsultasi Teknis P2 TBC			2 Laporan	2 Laporan											
					Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2 Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP) dari Kemenkes RI			2 Laporan	2 Laporan											
					Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2PTM			1 Dokumen	11 Laporan											
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DDHB/C di Kab/Kota			27 Orang	5 Laporan											
					Jumlah Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi GIRIJ			26 Laporan	26 Laporan											

								Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Konsultasi Teknis Program P2PTM						1 Laporan				
								Jumlah Laporan Hasil Pra Assesment Eliminasi Malaria Kabupaten/Kota						12 Laporan				
								Jumlah Laporan Kegiatan Advokasi Kelembagaan KPA Provinsi ke KPA Kabupaten/Kota			1 Dokumen			10 Laporan				
								Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desentralisasi Obat ARV di Kab/Kota			16 Laporan			16 Laporan				
								Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan Survei Penularan Kejadian Filariasis			5 Dokumen			5 Dokumen				
								Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Manajemen Tatalaksana Kasus Filariasis & Pengendalian Filariasis			16 Laporan			16 Laporan				

1	2	2	1, 02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Pangan dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji	Tersedia nya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.00 persen	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	16 Dokumen	16 Dokumen	171.583.000	171.583.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen	171.583.000	
						Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	2. Penilaian Asrama Haji			100.00 persen	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan						Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen	171.583.000	
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyenggarakan Kesehatan Tradisional	3. Pengawasan IKL Higiene Sanitasi Pangan di TPP tempat Transit Calon Jemaah Haji			88.00 persen	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota							Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyenggarakan Kesehatan Tradisional	88.00 persen	171.583.000
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	4. Pengawasan IKL Higiene Sanitasi Embarkasi Haji			90	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan							Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	90	171.583.000

																		Jamban Sehat											
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	5. Pendampingan Kegiatan Keamanan Pangan (Food Safety)		80.19 persen	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota					Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	6. Monitoring dan Evaluasi Citarum Harum		100.00 persen	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	7. Workshop Evaluasi Citarum Harum Aspek Kesehatan Lingkungan		100.00 persen	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen

																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen
																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen

1	2	2	1, 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	null	Tersedia nya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			83.00 p ersen		0 null	16 Dok umen	16 Dok umen	PONDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 p ersen	6.000.000. 000
						Persentase Kab/Kota yang siap melaksana kan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkat kan akses pelayanan terhadap masyarakat				100.00 persen							Persentase Kab/Kota yang siap melaksana kan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkat kan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen	
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional				88.00 p ersen							Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	88.00 p ersen	
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap				90							Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	90	

															Jamban Sehat		
															Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen	
															Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
															Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	
															Jamban Sehat		
															Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen	
															Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
															Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	

																	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen			Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen
																	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen
																	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen			Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen
																	Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen			Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen
																	Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen			Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen

1	2	2	1, 02	1 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Jumlah Dokumen Laporan Pembiayaan Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI-JK Provinsi Jawa Barat	Tersedia nya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandung, Cicendo , Pasir Kaliki	83.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	353.361.219.960	391.554.958.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen	354.000.000.000			
						Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	2. Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Percepatan Klaim dan Dispute Klaim Covid -19			100.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen										Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan Tingkat Provinsi Jawa Barat			88.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen											Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional

							90	1 Dokumen	1 Dokumen									Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	4. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan									Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	90				
							80.19 persen		1 Dokumen										Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	5. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen			
							100.00 persen												Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi												Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen	
							100.00 persen												Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan												Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen	

																		Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen											Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen	
																		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen										Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen		
																		Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen									Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen			
																		Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen									Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen			
																		Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen									Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen			

1	2	2	1,02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1.) Kab/Kota terfasilitasi penguatan pelayanan kesehatan primer	Tersedia nya Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	83.00 persen	27 Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota	16 Dokumen	16 Dokumen	4.964.743.840	2.007.535.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 persen	1.300.000.000				
						Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layat Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	2.) Kab/Kota terfasilitasi peningkatan Puskesmas Terpadu dan Juara			100.00 persen	27 Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota										Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layat Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100.00 persen	
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	3.) Dokumen laporan Tenaga Pendamping Program			88.00 persen	1 dokumen	1 dokumen											Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	88.00 persen
						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	4.) Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan AKB di Fasyankes			90	1 dokumen	1 dokumen											Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	90

																Jamban Sehat														
																Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	5.) Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Penguatan FKTP	80.19 persen	1 dokumen	1 dokumen									Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen
																Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	6.) Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Terpadu dan Juara	100.00 persen	1 dokumen	1 dokumen									Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen
																Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	7). Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	100.00 persen		1 Dokumen									Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen

																			Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen													Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen
																			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen													Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen
																			Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen													Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen
																			Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen													Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen
																			Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen													Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen

1	2	2	1, 02	2 3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1.) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi layad rawat provinsi	Tersedia nya Dokume n Layanan Kesehat an untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandun g, Cicendo , Pasir Kaliki	83.00 p ersen	1 dokumen	1 dokumen	16 Dok umen	16 Dok umen	14.457.93 0.170	14.457.9 30.170	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	83.00 p ersen	14.472.74 4.000	
				Persentase Kab/Kota yang siap melaksana kan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkat kan akses pelayanan terhadap masyaraka t		2.) Kab/Kota terfasilitasi pertemuan evaluasi layad rawat provinsi Jawa Barat				100.00 persen	27 Kabupa ten/Kota	27 Kabupa ten/Kota						Persentase Kab/Kota yang siap melaksana kan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkat kan akses pelayanan terhadap masyaraka t	100.00 persen		
				Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelen garakan Kesehatan Tradisiona l		3.) Kab/Kota terfasilitasi workshop petugas Call Center Layad Rawat				88.00 p ersen	27 Kabupa ten/Kota	27 Kabupa ten/Kota						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelen garakan Kesehatan Tradisiona l	88.00 p ersen		
				Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap		4.) Dokumen laporan Call Center 119 Layad Rawat Provinsi dan Kab/Kota				90	1 dokumen	1 dokumen						Persentase Kabupaten /Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap	90		

																		Jamban Sehat														
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	5.) Dokumen laporan Tenaga Pendamping Program	80.19 persen	2 dokumen	2 dokumen									Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	6.) Kab/Kota terfasilitasi Monitoring evaluasi dan pembinaan kewaspadaan umum pada pelayanan PSC 119	100.00 persen	27 Kabupaten/Kota	27 Kabupaten/Kota									Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	7). Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.00 persen		36 Unit							Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100.00 persen		

																	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen													Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen
																	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen												Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen	
																	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen												Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen	
																	Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen												Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen	
																	Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen												Persentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen	

																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen
																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen

																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen
																		Jamban Sehat			
																		Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi			80.19 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			100.00 persen
																		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			100.00 persen

					Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)												Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95.00 persen	
					Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan												Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	91.00 persen	
					Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar												Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen	
					Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas												Persentase Kabupaten /Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	90.00 persen	
					Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)												Persentase Kabupaten /Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85.00 persen	
1	2	2	1,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										312.125.780	312.125.780			920.000.000

1	2	2	1,03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Dokumen Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	312.125.780	312.125.780	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	100.00 persen	920.000.000
							Jumlah Dokumen Profil Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen							
							Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Informasi Covid-19 dan Vaksinasi				1 Dokumen	1 Dokumen							
							Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen							
1	2	2	1,03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat		Tersedianya Dokumen Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100.00 persen		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	100.00 persen	0
1	2	2	1,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									1.553.811.120	1.413.861.320			1.171.122.940	

1	2	2	1.	04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Fasilitas di dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 persen	60 RS	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	196.285.910	195.727.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	60.00 persen	0	
							Persentase Kab/Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Rumah Sakit			90.00 persen	70 Rumah Sakit	70 Rumah Sakit						Persentase Kab/Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	90.00 persen	
							Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar				96.00 persen								Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	96.00 persen	
							Persentase Rumah Sakit Terakreditasi				90.00 persen								Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	90.00 persen	

1	2	4	1,01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Seksi Farmasi Kosalkes Mamin	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Kota Bandung, Pasir Kaliki	88.00 persen	1 Dokumen	90 Sarana	90 Sarana	106.918.019	106.918.019	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Seksi Farmasi Kosalkes Mamin	88.00 persen	400.000.000
						Jumlah Dokumen Hasil Konsolidasi terkait Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan DPMPSTP					1 Dokumen	1 Dokumen							
						Jumlah Sarana Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi Cabang yang dilakukan Pemeriksaan					35 Sarana	35 Sarana							

						Persentase Ketersediaan data kinerja												Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen			
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum													Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100.00 persen		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		100 Persen	12 Bulan	65 Orang	12 Bulan	12 Bulan			PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 Persen		
						Persentase Ketersediaan data kinerja													Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen	220.000.000	
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum													Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	100.00 persen		
1	2	1	1,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											206.400.000	208.796.000					
1	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											6.426.515.560	6.825.404.279					
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Semua Kelurahan		100	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan			PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	44.000.000	

1	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	12 Bulan	15 Paket	12 Bulan	12 Bulan	3.124.370.560	3.096.023.210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	2.200.000.000
1	2	1	1,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		100	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1.311.711.000	1.314.934.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	1.100.000.000
1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Sukajadi, Semua Kelurahan		100	1000 Kali	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1.950.434.000	2.374.446.169	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	5.940.000.000
1	2	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.800.540.000	2.385.340.000				3.080.000.000	
1	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Jasa Penunjang	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		100	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2.800.540.000	2.385.340.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	3.080.000.000
1	2	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3.450.970.000	4.892.244.996				3.850.000.000	

1	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		100.00 persen	14 Unit	14 Unit	12 Bulan	12 Bulan	955.970.000	955.970.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	1.100.000.000
1	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		100.00 persen	12 Bulan	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	2.495.000.000	3.936.274.996	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	2.750.000.000
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											51.527.327.960	49.183.656.328				67.060.000.000
1	2	2	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											50.898.077.960	48.419.806.328				66.290.000.000
1	2	2	1,01	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur		90.00 persen	1 Dokumen	1 Unit	3 Dokumen	3 Dokumen	8.272.483.623	5.152.703.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	90.00 persen	16.500.000.000

1	2	2	1,01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Tersedia nya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur	90.00 persen	12 Bulan	10 Paket	3 Dokumen	3 Dokumen	25.896.216.337	14.474.798.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	90.00 persen	42.790.000.000
1	2	2	1,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Tersedia nya Dokumen Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandungan, Sukajadi, Pasteur	90.00 persen	12 Bulan	59 Unit	3 Dokumen	3 Dokumen	16.729.378.000	28.792.304.828	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	90.00 persen	7.000.000.000
1	2	2	1,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										629.250.000	763.850.000				770.000.000

1	2	2	1,04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Tersedia nya Dokumen Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bandung g. Sukajadi , Pasteur	90.00 persen	12 Bulan	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	629.250.000	763.850.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	90.00 persen	770.000.000
TOTAL															68.885.730.000	66.967.820.003			88.334.000.000	
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																				
Provinsi Jawa Barat																				
Tahun 2022																				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																				
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PELATIHAN KESEHATAN																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
1																				
1	2														3.984.000.000	3.984.000.000				6.250.448.344
1	2	1													3.421.630.765	3.409.665.765				3.849.883.077
1	2	1	1,05												15.000.000	19.035.000				20.938.500

1	2	1	1,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	7 Orang	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	19.035.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	20.938.500
						Persentase Ketersediaan data kinerja	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan/Workshop/Bimtek dll			100.00 persen	4 Orang	7 Orang					Persentase Ketersediaan data kinerja	100.00 persen	
1	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										467.058.669	429.164.952			595.415.271
1	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	42.895.377	46.448.037	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	47.184.915
							Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Administrasi Umum				39 Jenis	40 Jenis							
1	2	1	1,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	01. Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	1 Pekerja	12 Bulan	12 Bulan	266.220.273	166.545.955	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	292.842.300
							02. Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Kebersihan				26 Jenis	26 Jenis							

						keuangan dan umum		trasi Umum										keuangan dan umum		
							02. Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Publikasi dan Dokumentasi				3 Jenis	3 Jenis								
							03. Jumlah Penyediaan Fotocopy				50000 Lembar	50000 Lembar								
							04. Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan					3 Paket								
1	2	1	1,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	01. Jumlah Waktu Penyediaan Air Minum Galon	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandung, Pasir Kaliki	100	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	
							02. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				650 OK	1800 OK			66.750.000	86.850.000				95.535.000
							03. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur				240 OK	192 OK								
							04. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan								

1	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	01. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhi Waktu Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100	50 OK	82 OK	12 Bulan	12 Bulan			PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100		
							02. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Provinsi				12 OK	24 OK			41.116.000	79.243.941				87.168.335	
							03. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan									
1	2	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										262.134.400	252.419.500				288.347.840	
1	2	1	1,07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	01. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhi Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Bandungan, Cicendo, Pasir Kaliki	100.00 persen	18 Unit	41 Unit	12 Bulan	12 Bulan			PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen		
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	02. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio			100	1 Set	1 Set			262.134.400	252.419.500		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	288.347.840	

1	2	1	1,09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	01. Jumlah Pemeliharaan AC	Terpenuhinya Waktu Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	100.00 persen	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	12 Bulan	12 Bulan	240.917.120	190.742.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100.00 persen	265.008.832					
						02. Jumlah Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						03. Jumlah Pemeliharaan Genset					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						04. Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Bersih					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						05. Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						06. Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Printer					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						07. Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Lift					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						08. Jumlah Penyemprotan Disinfektan					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						09. Jumlah Penyedotan Septictank					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													
						10. Jumlah Pemeliharaan Televisi					1 Pekerjaan	1 Pekerjaan													

1	2	3	1,02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD Upelkes	01. Nilai Akreditasi Institusi	Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bandung, Cicendo, Pasir Kaliki	4.57 persen	3.7 Nilai	3.7 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	518.369.235	544.684.235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis UPTD Upelkes	4.57 persen	2.367.950.267			
						02. Persentase Pelatihan Yang Terakreditasi Dalam Satu Tahun					100 Persen	100 Persen											
						03. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan					1 Kegiatan	1 Kegiatan											
						04. Jumlah Video Pembelajaran Pelatihan yang dibuat					2 Video	2 Video											
						05. Jumlah Kurikulum yang disusun					4 Kurikulum	3 Kurikulum											
						06. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Tatalaksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						150 Orang	147 Orang										

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat selain berasal dari APBD, juga berasal dari pendapatan dan SiLPA BLUD terutama bagi UPTD RS Dinas Kesehatan yang telah berstatus RS dengan manajemen keuangan BLUD sebanyak 5 (lima) RS yaitu RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RSUD Jampangkulon, RS Paru Sidawangi, dan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat. Pada anggaran perubahan ini, beberapa RS tersebut akan menggunakan SiLPA tahun 2021 untuk pembiayaan beberapa kegiatan pada perubahan 2022 dengan estimasi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Estimasi kebutuhan Pemanfaatan SiLPA Tahun 2022

No	Rumah Sakit	Estimasi Pendapatan Tahun 2023	SiLPA 2021	SiLPA digunakan TA 2022	SiLPA diusulkan TA 2023
1	RSUD Al Ihsan	350.000.000.000	163.931.621.223	113.533.452.606	116.072.664.767
2	RSUD Pameungpeuk	60.442.333.403	19.930.517.201	14.230.517.201	5.700.000.000
3	RSUD Jampangkulon	57.255.482.479	11.257.608.953	-	11.257.608.953
4	RS Paru Sidawangi	13.539.853.145	22.792.865.862	2.000.000.000	30.391.309.403
5	RS Jiwa	36.016.305.217	45.887.708.984	12.234.950.000	36.776.828.984
Total		517.253.974.244	263.800.322.223	141.998.919.807	200.198.412.107

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan ASN Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang dan UPTD yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian dan program/kegiatan kabupaten/kota. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 yang berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K), M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 196212031988032001